



ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTORNIK (SPBE)
KABUPATEN MIMIKA

2023

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar.....	6
Bab I Pendahuluan	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan	7
1.3. Dasar Hukum.....	7
1.4. Sasaran Kegiatan	9
Bab 2 Arsitektur Proses Bisnis.....	10
2.1 Struktur dan Referensi Arsitektur Proses Bisnis.....	10
2.1.1 Prinsip Arsitektur Proses Bisnis	10
2.1.2 Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional	11
2.1.3 Keterkaitan Antar Domain.....	14
2.2 Proses Bisnis Kabupaten Mimika.....	14
2.2.1 Pemetaan Visi, Misi, dan Strategi	14
2.2.2 Identifikasi Stakeholder Mimika	15
2.2.3 Proses Bisnis Kabupaten Mimika.....	17
2.2.4 Kerangka Arsitektur Proses Bisnis.....	18
2.2.5 Metadata Arsitektur Proses Bisnis	19
Bab 3 Arsitektur Data dan Informasi.....	27
3.1 Struktur dan referensi Arsitektur Data dan Informasi.....	27
3.1.1 Prinsip Arsitektur Data dan Informasi	27
3.1.2 Referensi Data dan Informasi Tingkat Nasional	28
3.1.3 Keterkaitan Antar Domain.....	31
3.2 Data dan Informasi Kabupaten Mimika.....	33
3.2.1 Identifikasi Kebutuhan Kabupaten Mimika	33
3.2.2 Metadata Arsitektur Data dan Informasi	34

Bab 4	Arsitektur Layanan	40
4.1	Struktur dan Referensi Arsitektur Layanan	40
4.1.1.	Prinsip Arsitektur Layanan	40
4.1.2.	Referensi Layanan Tingkat Nasional	41
4.1.3.	Keterkaitan Antar Domain.....	43
4.2.	Layanan Kabupaten Mimika	44
4.2.1.	Identifikasi Kebutuhan Layanan	44
4.2.2.	Metadata Arsitektur Layanan.....	44
Bab 5	Arsitektur Aplikasi	286
5.1.	Struktur dan Referensi Arsitektur Aplikasi.....	286
5.1.1.	Prinsip Arsitektur Aplikasi.....	286
5.1.2.	Referensi Aplikasi Tingkat Nasional	287
5.2.	Keteraitan Antar Domain	287
5.2.1.	Aplikasi Kabupaten Mimika.....	288
5.2.2.	Identifikasi Kebutuhan Aplikasi.....	288
5.2.3.	Metadata Arsitektur Aplikasi	289
Bab 6	Arsitektur Infrastruktur.....	328
6.1.	Struktur dan Referensi Arsitektur Infrastruktur.....	328
6.1.1.	Prinsip Arsitektur Infrastruktur.....	328
6.1.2.	Referensi Infrastruktur Tingkat Nasional	329
6.2.	Referensi Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Mimika	332
6.2.1.	Metadata Arsitektur Infrastruktur	333
Bab 7	Arsitektur Keamanan	356
7.1.	Struktur dan Referensi Arsitektur Keamanan	356
7.1.1.	Prinsip Arsitektur Keamanan	356
7.1.2.	Refrensi Keamanan Tingkat Nasional	356
7.1.3.	Keterkaitan Antar Domain.....	357
7.2.	Keamanan Kabupaten Mimika	357
7.2.1.	Identifkasi Kebutuhan Keamanan	358
7.2.2.	Metadata Arsitektur Keamanan.....	358

Bab 8 Penutup.....	363

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud penyusunan Arsitektur SPBE di Kabupaten Mimika 2023- 2028 ini adalah:

1. Menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika agar implementasi SPBE menjadi lebih terarah dan komprehensif;
2. Memetakan kondisi Kabupaten Mimika yang berkaitan dengan aplikasi dan infrastruktur untuk mendukung layanan SPBE;
3. Merumuskan arah kebijakan pembangunan layanan SPBE di Kabupaten Mimika; dan
4. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Kabupaten Mimika yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Sementara tujuan dari penyusunan Arsitektur SPBE di Kabupaten Mimika 2023-2028 ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka kerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel;
2. Memberikan arahan dan strategi pengelolaan dan pengembangan layanan SPBE Kabupaten Mimika agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
3. Menyusun dokumen Arsitektur SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang berfungsi sebagai pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Mimika.
4. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Daerah di Kabupaten Mimika ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor - 7 - 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1.4. Sasaran Kegiatan

Tersusunnya arsitektur SPBE Kabupaten Mimika dengan menggunakan pendekatan *enterprise* arsitektur.

Bab 2 Arsitektur Proses Bisnis

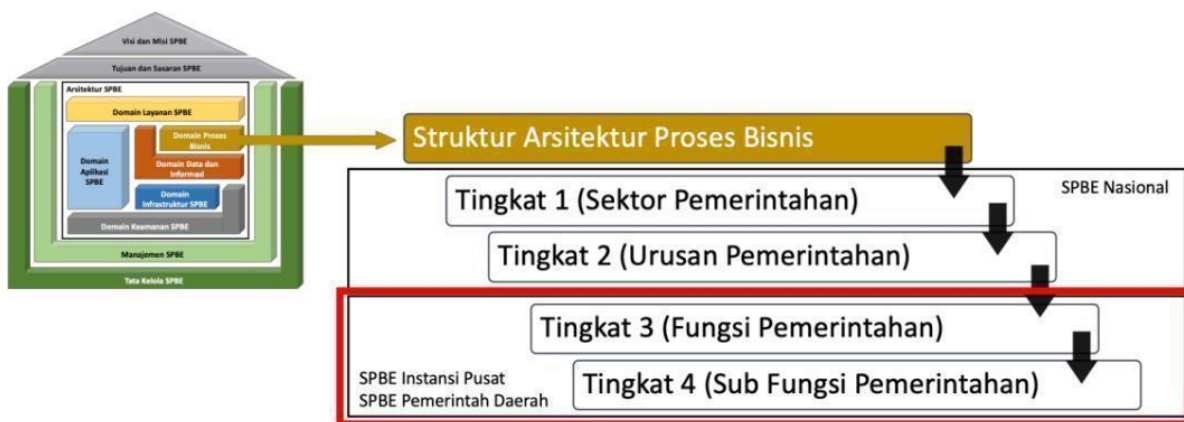
2.1 Struktur dan Referensi Arsitektur Proses Bisnis

2.1.1 Prinsip Arsitektur Proses Bisnis

Prinsip-prinsip proses bisnis dalam *framework Enterprise* Arsitektur Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1. Bersifat konsisten dan komprehensif
2. Bersifat adaptif mengikuti kebutuhan *stakeholder* dan perubahan regulasi
3. Dilakukan secara berkesinambungan

Arsitektur proses bisnis Kabupaten Mimika menggambarkan proses bisnis dan tugas utama dari Kabupaten Mimika dengan acuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020. Arsitektur proses bisnis juga disusun dengan mengacu pada rancangan Peraturan Presiden tahun 2021 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur proses bisnis juga disusun dengan mengacu pada rancangan Peraturan Presiden tahun 2021 tentang Arsitektur SPBE Nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.1



Penyusunan arsitektur proses bisnis ini mengacu pada proses bisnis di tingkat nasional dengan tujuan untuk membentuk layanan SPBE. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, arsitektur proses bisnis berfokus pada Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) dan Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan). Fungsi Pemerintahan menjelaskan lebih rinci arsitektur proses bisnis Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) dengan tetap mengacu pada arsitektur Tingkat 1 dan Tingkat 2. Arsitektur proses

bisnis Tingkat 3 disusun untuk mengatur fungsi pemerintahan dan dijelaskan lebih rinci pada arsitektur proses bisnis Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan).

Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Selain itu Arsitektur ini disusun mengikuti Visi Arsitektur. *Architecture Vision* adalah arsitektur yang menjelaskan gambaran umum Kabupaten Mimika meliputi penjelasan: visi, misi, model bisnis, dan pemetaan serta sinergi semua lapisan arsitektur di dalam pengembangan *Enterprise Architecture*. *Architecture Vision* pada Kabupaten Mimika terdiri dari 5 (lima) *artifact* sebagai berikut:

Architecture Principles adalah prinsip-prinsip tentang arsitektur yang dibangun sehingga akan menjadi landasan pertimbangan setiap langkah dalam pengembangan arsitektur, yaitu fleksibilitas, keselarasan, kepatuhan realistik dan standarisasi.

Architecture Goals merupakan tujuan yang ingin dihasilkan dari arsitektur yang akan dibangun selama periode waktu tertentu. Arsitektur Kabupaten Mimika memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu simplifikasi bisnis, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan organisasi dengan keselarasan TIK.

Vision, Mission, and Strategy adalah *artifact* yang menjelaskan visi, misi, dan peta strategis Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika telah menetapkan visi yang bersifat jangka panjang dan dapat memberikan aspirasi, motivasi dan gambaran dari organisasi yang ingin dikembangkan. (sesuai dengan Review Renstra Kabupaten Mimika 2022).

Value Chain Diagram adalah diagram yang menggambarkan fungsi inti dan pendukung yang saling bersinergi untuk mewujudkan visi Kabupaten Mimika. Misi pembangunan Kabupaten Mimika diacu sebagai gambaran fungsi utama yang harus menjadi prioritas.

Solution Concept Diagram adalah *grand design enterprise architecture* yang menyajikan hubungan *Strategic Plan*, *Business Architecture*, *Data Architecture*, *Application Architecture*, *Technology Architecture*, *Service Architecture*, dan *Security Architecture*

2.1.2 Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional

Domain proses bisnis juga mengacu pada referensi proses bisnis (RB) tingkat nasional, khususnya pada kode referensi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07) seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.1

Tabel 2 - 1 Referensi Proses Bisnis (RB) Tingkat Nasional Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)

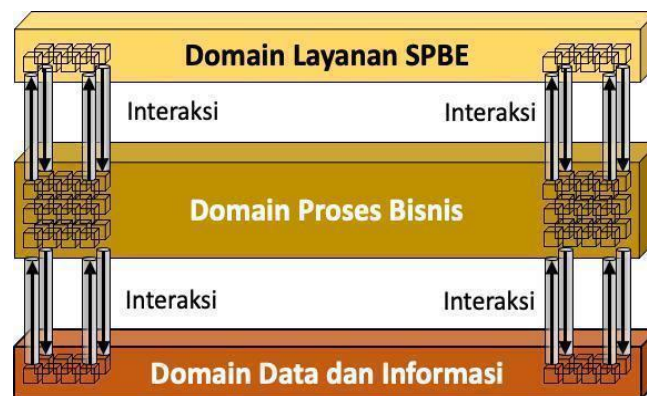
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri termasuk di dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pengawalan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara termasuk di dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, manajemen perekonomian, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pajak.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pelayanan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi termasuk di dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos, serta penyelenggaraan pos.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan

		dan pendanaan, strategi pembangunan nasional perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis program/kebijakan.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen pelayanan publik, manajemen SPBE, kearsipan nasional, pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
09.07	Kesekretariatan Negara	bidang sekretariat negara termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan pemerintahan, pengkajian strategis, serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, politik dalam negeri, litigasi isu strategis, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Di bidang pemerintahan umum, target Arsitektur SPBE adalah untuk mewujudkan layanan digital pemerintah terintegrasi. Transformasi proses bisnis pada sektor pemerintah diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan internal (G2E dan G2G) yang menerapkan konsep *digital working collaboration* serta *smart city* pada *smart government*, yang merupakan arah kebijakan nasional hingga tahun 2024. Transformasi digital nasional diidentifikasi untuk mendukung operasional pemerintah berupa urusan pemerintahan dalam negeri (RB 09.01), keuangan (RB 09.02), perencanaan pembangunan nasional (RB 09.05), aparatur negara (RB 09.06), sekretariat negara (RB.09.07) di tingkat nasional.

2.1.3 Keterkaitan Antar Domain

Arsitektur proses bisnis berinteraksi dengan domain layanan SPBE serta domain data dan informasi. Domain arsitektur proses bisnis mencakup berbagai macam proses bisnis yang akan menghasilkan data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah. Domain proses bisnis berelasi langsung dengan domain data dan informasi, untuk menggambarkan data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses bisnis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Domain proses bisnis juga harus dapat mengidentifikasi layanan yang dihasilkan dalam urusan lingkungan dan sumber daya alam yang dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan di Kabupaten Mimika. Keterkaitan antara domain proses bisnis, data dan informasi, serta layanan ditunjukkan pada Gambar 2.1.3.



Arsitektur proses bisnis disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional, transformasi digital, penyediaan layanan pemerintahan internal, digital working collaboration, smart city dan smart government. Identifikasi proses bisnis di bidang kebijakan dan tata kelola *e-government* ditujukan untuk mendukung terbentuknya layanan SPBE di bidang layanan *e-government*, serta sebagai acuan untuk mengidentifikasi data dan informasi berupa data pokok dan data tematik yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh fungsi-fungsi yang ada di Kabupaten Mimika.

2.2 Proses Bisnis Kabupaten Mimika

2.2.1 Pemetaan Visi, Misi, dan Strategi

Visi, Misi, dan Strategi SPBE Kabupaten Mimika merupakan turunan dari penjabaran visi, misi, dan strategi sebagai mandate dari Presiden kepada Bupati Kabupaten Mimika yang memiliki keselarasan dengan pembangunan nasional.

Visi Kabupaten Mimika adalah

“Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai, dan Sejahtera”

Dengan visi tersebut telah ditetapkan Misi sebagai berikut,

1. Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,
2. Menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai,
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,
5. Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Mimika.

2.2.2 Identifikasi Stakeholder Mimika

Berdasarkan visi, misi, dan sasaran Kabupaten Mimika, dilakukan pula identifikasi mitra kerja yang merupakan stakeholders beserta keterlibatan dan aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses bisnis dalam Kabupaten Mimika, yang terdiri atas stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

Stakeholder internal Kabupaten Mimika dapat diidentifikasi dari struktur organisasi yang tercantum mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Mimika tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Kabupaten Mimika terdiri atas:

1. Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika
7. Dinas Sosial Kabupaten Mimika
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mimika
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mimika
10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika
13. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mimika
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika
15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika
18. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Mimika
19. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika
21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika
22. Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mimika
24. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mimika
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah
28. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika
31. RSUD Kabupaten Mimika
32. Kecamatan (6)
33. Kelurahan (68)
34. Puskesmas (26)

Implikasi yang paling mendasar terhadap perubahan SOTK Kabupaten Mimika tersebut adalah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja Kabupaten Mimika, mulai dari level organisasi paling tinggi (Dinas, Badan dan Sekretariat) dan unit kerja di bawahnya. Untuk itu, dilakukan reviu terhadap peta strategi Level 0, 1 dan 2 di Lingkungan Kabupaten Mimika sesuai OTK baru, utamanya pada unit kerja yang terdampak langsung terhadap perubahan struktur organisasi tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan sasaran strategis antar unit kerja dan konsistensi cascading sasaran dan indikator.

Sementara itu, hasil identifikasi *stakeholder* eksternal Kabupaten Mimika sesuai dengan dokumen peta proses bisnis yang ada, dipetakan bahwa *stakeholder* eksternal Kabupaten Mimika meliputi:

1. Pemerintah
2. Pelaku Usaha
3. Masyarakat
4. Akademisi

2.2.3 Proses Bisnis Kabupaten Mimika

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Mimika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan pemodelan Peta Proses Bisnis seperti tampak pada Gambar dibawah dan penjelasan Peta Relasi pada Gambar berikutnya . Kabupaten Mimika memetakan 5 (lima) Proses Utama, 4 (empat) Proses Pendukung dan 5 (lima) Sistem Manajemen. Pengelompokan proses bisnis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 - 2 Proses Utama Kabupaten Mimika

MKB - 01	Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,
MKB - 02	Menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai,
MKB - 03	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,
MKB - 04	Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,
MKB - 05	Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Mimika.

Tabel 2 - 3 Proses Manajerial Kabupaten Mimika

MKB - 03	Pengelolaan SDM Aparatur
MKB - 04	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
MKB - 05	Pengendalian dan Pengawasan Internal
MKB - 06	Pengelolaan Program, Anggaran, dan Kinerja

MKB – 07	Pengelolaan Keuangan dan Aset

Tabel 2 - 4 Proses Pendukung Kabupaten Mimika

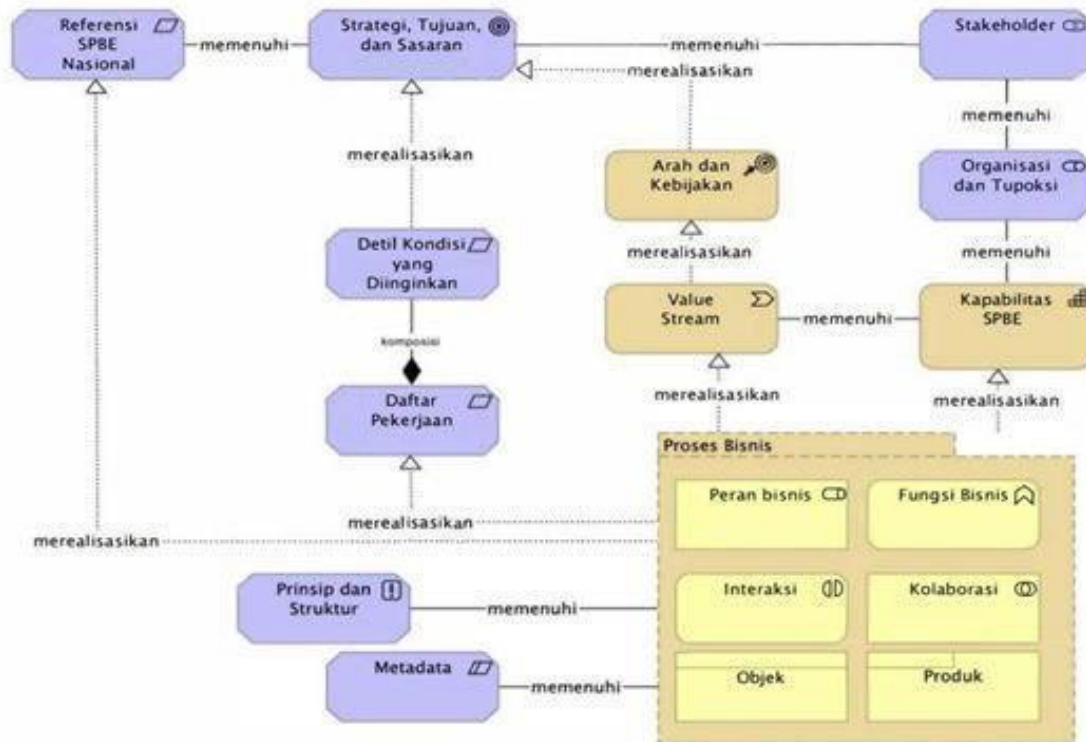
MKB – 08	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
MKB – 09	Pengelolaan Administrasi Umum
MKB – 10	Dukungan Regulasi dan Pelayanan Hukum
MKB – 11	Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi Publik

Jika didasarkan pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) nasional maka pengelompokan proses Bisnis Kabupaten Mimika akan berada pada posisi pemetaan sebagai berikut:

- **Level 1:** berada pada kelompok **RAB.09 Pemerintahan Umum**
- **Level 2:** berada pada kelompok **RAB.09.01 - 09.07**
- **Level 3:** berada pada kelompok **sesuai dengan urusan OPD**

Sehingga seluruh Level 0 proses bisnis Kabupaten Mimika akan berada mulai pada Level-3 sampai Level ke-N proses bisnis jika dilihat secara nasional.

2.2.4 Kerangka Arsitektur Proses Bisnis



Gambar 2.2.2 Kerangka Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Mimika

Kerangka arsitektur proses bisnis pada Gambar 2.2.2 menunjukkan bahwa Referensi SPBE nasional menjadi acuan utama yang selaras dengan strategi, tujuan, dan sasaran dari Kabupaten Mimika, yang selanjutnya diturunkan ke dalam arah dan kebijakan, dan diturunkan dalam value streams. Selain itu, strategi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mimika juga menjadi acuan dalam penetapan stakeholders, organisasi, dan tupoksi serta kapabilitas SPBE. Arsitektur proses bisnis meliputi pemetaan peran bisnis, fungsi bisnis, interaksi, kolaborasi, objek dan produk yang berkaitan dengan value streams, kapabilitas, serta tetap mengacu pada referensi SPBE nasional, prinsip dan struktur, serta metadata proses bisnis. Kapabilitas SPBE juga harus dapat menggambarkan keselarasan antara people (peran dan struktur organisasi), process (proses bisnis yang baik sesuai panduan dan pencapaian sasaran organisasi), serta technology (aplikasi dan infrastruktur pendukung).

2.2.5 Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Struktur arsitektur proses bisnis berfokus pada SPBE Instansi Pusat, namun disusun dengan tetap berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan Perpres SPBE pasal 11 dan 12. Untuk menjamin struktur dan format baku untuk mengidentifikasi proses bisnis, telah disusun metadata proses bisnis dalam Perpres SPBE. Penggunaan metadata ini juga ditujukan untuk memudahkan

pencarian, penggunaan dan pengelolaan proses bisnis, serta untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah dalam Satu Data Indonesia. Dalam pengumpulan data tentang proses bisnis yang diterapkan di lingkungan Kabupaten Mimika, atribut-atribut metadata yang diterapkan ditunjukkan pada Tabel 2.2.4.

Tabel 2 - 5 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Unit Kerja	Unit Kerja merupakan satuan kerja yang melaksanakan tugas dalam organisasi.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Daftar proses bisnis dan metadatanya ditunjukkan pada Tabel 2.2.5.

ID	Nama Bisnis/Urusan	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)
Proses Utama						
MKB-DAB.01	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mimika yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	MKB-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mimika yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
MKB-DAB.01.01	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	DINKES, RSUD, DPPKB, DKPP	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	MKB-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mimika yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
MKB-DAB.01.02	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	DINKES,DISPORA	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	MKB-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mimika yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
MKB-DAB.01.03	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan	DPUPR, DLH, DISPERKIM, DPKP	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan	MKB-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat

	Permukiman				Masyarakat	Kabupaten Mimika yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
MKB-DAB.01.04	Mengendalikan Sumber-Sumber Pencemar dan kerusakan lingkungan	DPUPR, DLH	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	MKB-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mimika yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
MKB-DAB.01.05	Meningkatkan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik PerKabupatenan	DISPERKIM,DLH	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	MKB-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mimika yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
MKB-DAB.02	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mimika yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Manajemen Tenaga Pendidikan	
MKB-DAB.02.01	Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	DISDIK	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Manajemen Tenaga Pendidikan	

MKB-DAB.02.02	Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	DPPPA, DISPORA, DIARPUS	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.05.01 Pemberdayaan Pemuda	
MKB-DAB.02.03	Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	BAPPEDA	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	RAB.06.03.05 Pengelolaan Inovasi Dan Inovasi	
MKB-DAB.02.04	Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	SATPOL PP, DINSOS, DPPPA, DISPA RBUD, Kecamatan, SETDA, BAKESBANGPOL	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	
MKB-DAB.03	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mimika yang Cerdas dan Melavani (Smart Government)		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.03.04 perumahan	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	
MKB-DAB.03.01	Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DISDUKCAPIL, DPPKB, SETDA, BKPSDM, SETWAN, BKAD, ISKOMINFO, DIARPUS, BAPPEDA, ITDA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Pembinaan Reformasi Birokrasi	
MKB-DAB.03.02	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur	DISDUKCAPIL, BPBD, DISKOMINFO	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan	

	dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)				Infrastruktur Dan Lingkungan Pemerintahan	
MKB-DAB.04	Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat					
MKB-DAB.04.01	Menurunkan Tingkat Pengangguran	DISNAKER,DISPARBUD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
MKB-DAB.04.02	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	DINSOS, BAPPEDA, SETDA, BPBD	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	
MKB-DAB.04.03	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	DISPERUMKIM, DPPPA, DKPP,BPBD	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	

MKB-DAB.05	Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Ekanami Daerah		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif Dan Produk Digital	
MKB-DAB.05.01	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINKUMDAGIN, BAPPEDA, DMPTSP, DKPP, DISPARBUD, BAPPENDA, SETDA	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif Dan Produk Digital	
MKB-DAB.05.02	Meningkatkan Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	DPUPR, BAPPEDA, SETDA,DLH	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.01 Pembinaan Industri Regional	
MKB-DAB.05.03	Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	DPUPR, DISHUB	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.04 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	
Proses Pendukung						
MKB-DAB.06	Pengelolaan Data dan Informasi					
MKB-DAB.07	Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa					
MKB-DAB.08	Pengelolaan Saran dan					

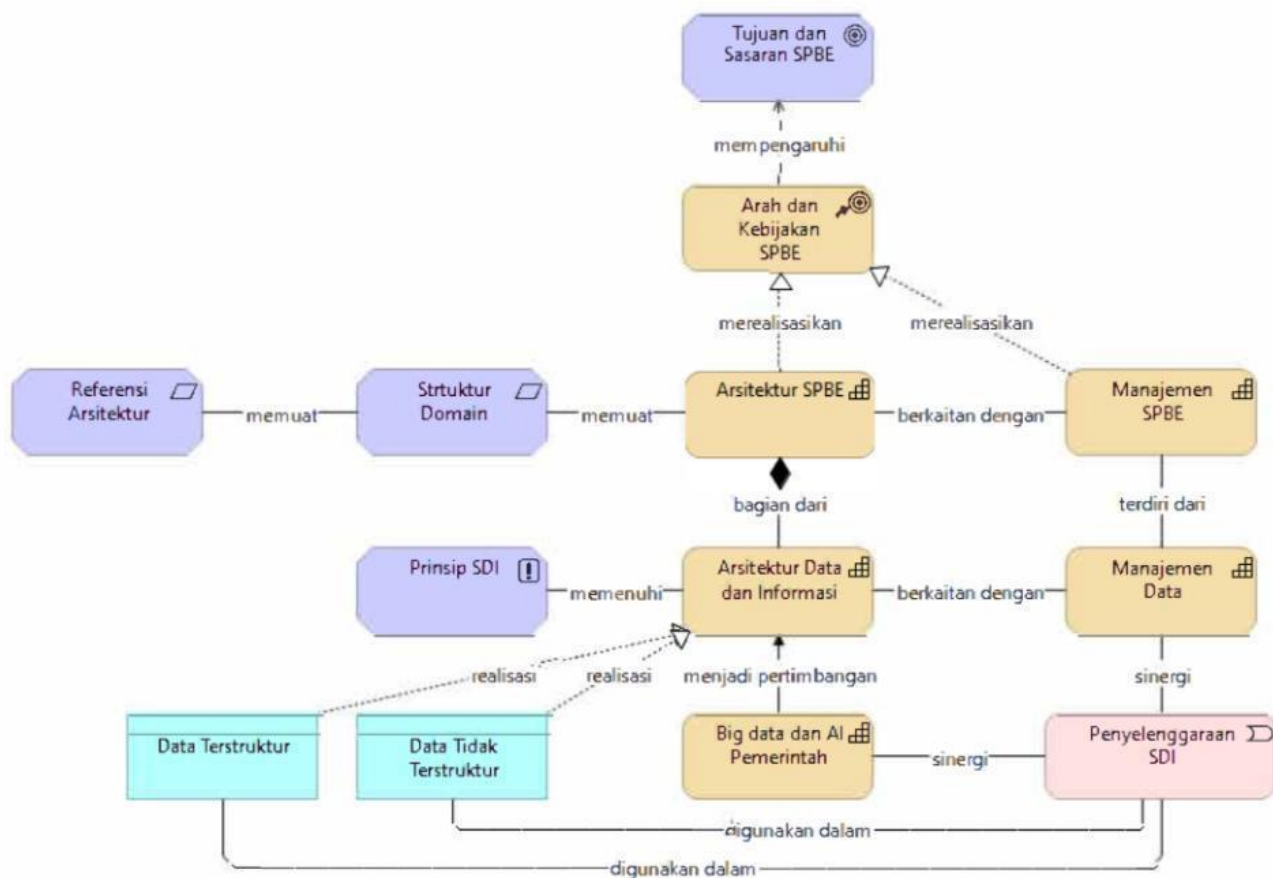
	Prasarana					
MKB-DAB.09	Pengelolaan Pelaporan					
Proses Manajerial						
MKB-DAB.10	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum					
MKB-DAB.11	Perencanaan Pembangunan					
MKB-DAB.12	Pengelolaan Keuangan dan Aset					
MKB-DAB.13	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur					
MKB-DAB.14	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan					
MKB-DAB.15	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana					
MKB-DAB.16	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					

Bab 3 Arsitektur Data dan Informasi

3.1 Struktur dan referensi Arsitektur Data dan Informasi

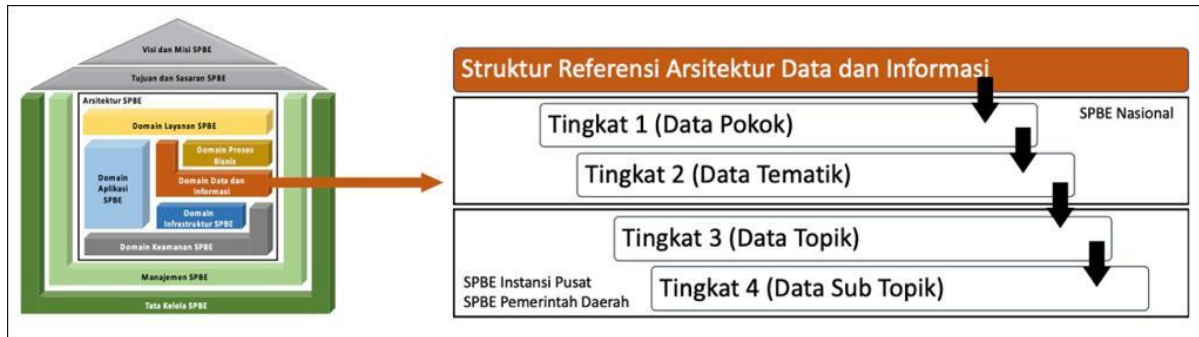
3.1.1 Prinsip Arsitektur Data dan Informasi

Dalam rangka penyelarasan rancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE Nasional, Instansi Pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas sebagai pengelola Satu Data Indonesia. Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan satu data Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.1.1 berikut



Arsitektur data dan informasi Kabupaten Mimika menggambarkan data dan informasi yang terkait dengan proses bisnis dan tugas utama dari Kabupaten Mimika dengan acuan utama Peraturan

Daerah Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020. Arsitektur data dan informasi juga disusun dengan mengacu pada rancangan Peraturan Presiden tahun 2021 tentang Arsitektur SPBE Nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.2.

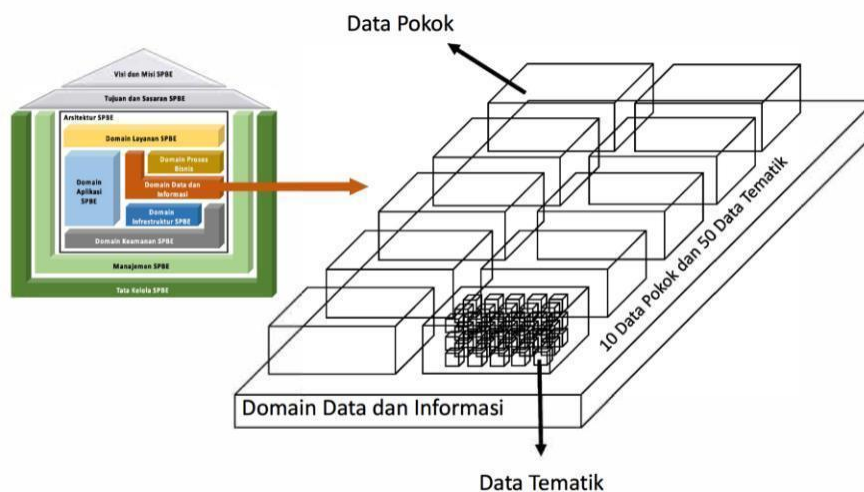


Gambar 3.1.2 Struktur arsitektur data dan informasi

Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

3.1.2 Referensi Data dan Informasi Tingkat Nasional

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan keterhubungan antara domain data dan informasi dengan proses bisnis. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa penyusunan proses bisnis dan memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta mendukung penerapan Aplikasi SPBE.



Berdasarkan karakteristik dari data yang ada, data yang dikelola di Kabupaten Mimika masuk dalam kategori data pokok pokok kode 03 (Informasi Pembangunan Kewilayahan), kode 04 (Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan), kode 05 (Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan), kode 06 (Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja), kode 09 (Informasi Pemerintahan Umum) dan kode 10 (Data Pendukung Umum). Adapun Referensi Data dan Informasi (RD) Tingkat Nasional dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3 - 1 Referensi Data dan Informasi (RD) Tingkat Nasional

Kode	Referensi	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
RAD.03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang Pekerjaan Umum
RAD.03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang Transportasi
RAD.03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
RAD.03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (4)		
RAD.04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
RAD.04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (5)		
RAD. 05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.

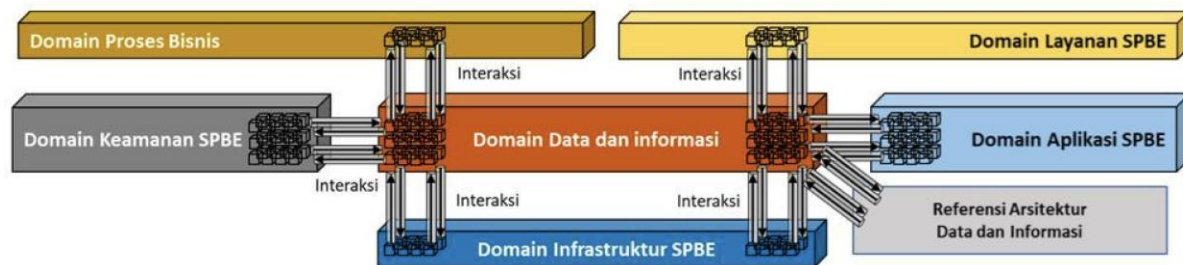
Kode	Referensi	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (6)		
RAD.06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
RAD.06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
RAD.09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
RAD.09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
RAD.09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
RAD.09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan nasional.
RAD.09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
RAD.09.06	Data Kesekretariatan	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		
RAD.10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
RAD.10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
RAD.10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang

Kode	Referensi	Deskripsi Referensi Arsitektur
		tidak tercakup dalam definisi lainnya.

Di bidang lingkungan dan sumber daya alam, Arsitektur SPBE adalah untuk mewujudkan layanan digital pemerintah terintegrasi. Transformasi proses bisnis pada sektor pemerintah diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan internal (G2E dan G2G) yang menerapkan konsep digital working collaboration serta smart city pada smart government, yang merupakan arah kebijakan nasional hingga tahun 2024. Transformasi digital nasional diidentifikasi untuk mendukung operasional pemerintah berupa urusan pemerintahan Umum (RAD 09) di tingkat nasional.

3.1.3 Keterkaitan Antar Domain

Arsitektur data dan informasi berinteraksi dengan domain layanan SPBE serta domain aplikasi SPBE. Keterkaitan antara domain proses bisnis, data dan informasi, serta layanan ditunjukkan pada Gambar 12.

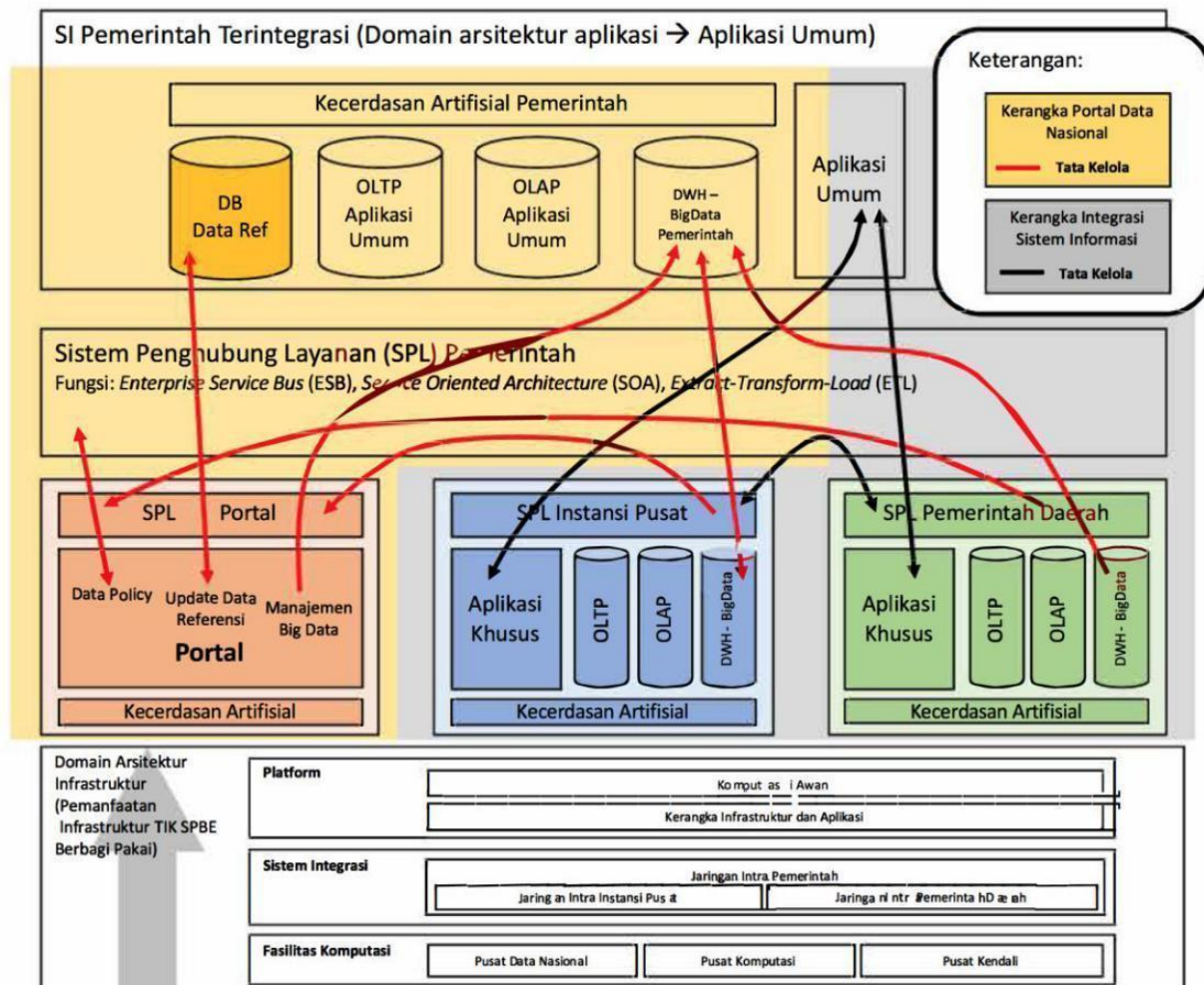


Gambar 3.1.4 Interaksi domain proses bisnis dengan domain layanan serta domain data dan informasi

Arsitektur proses bisnis disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional, transformasi digital, penyediaan layanan pemerintahan internal, digital working collaboration, smart city dan smart government. Identifikasi proses bisnis di bidang kebijakan dan tata kelola *e-government* ditujukan untuk mendukung terbentuknya layanan SPBE di bidang layanan *e-government*, serta sebagai acuan untuk mengidentifikasi data dan informasi berupa data pokok dan data tematik yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh fungsi-fungsi yang ada di Kabupaten Mimika.

Saat ini, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) digunakan pada proses integrasi data, dengan memanfaatkan jaringan konektivitas pada Kabupaten Mimika (LAN, WAN, dan internet) sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung. Interkoneksi yang dibutuhkan dalam

operasional aplikasi umum dalam bentuk SPLP, fungsi extract, transform, load (ETL) untuk interkoneksi ke database yang diperlukan dalam SI Pemerintah Terintegrasi. Proses integrasi ini termasuk sinkronisasi semua data dan informasi yang dimiliki oleh IPPD melalui Application



Programming Interface (API) antara sistem/aplikasi yang dikembangkan IPPD dengan Portal SDI.

Namun demikian, fasilitas komputasi di Kabupaten Mimika belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi pusat data nasional, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan big data. Dalam Perpres No 95 Tahun 2018 disebutkan bahwa penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah. Perangkat keamanan informasi di lingkungan Kabupaten Mimika saat ini terdiri dari perangkat firewall yang terdapat komponen proxy, content filtering, intrusion detection and prevention,

identitiy and access management, public key infrastructure (SSL), dan antivirus. Komponen antivirus terdapat antimalware dan antispam serta patch management.

3.2 Data dan Informasi Kabupaten Mimika

3.2.1 Identifikasi Kebutuhan Kabupaten Mimika

Kebutuhan data yang saat ini perlu dipenuhi oleh Kabupaten Mimika adalah data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, baik berkaitan dengan kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas kinerja dan SDM aparatur. Berikut identifikasi kebutuhan data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

1. Data Administrasi Kepegawaian
2. Data Peningkatan Kompetensi SDM
3. Data Bahan/Referensi Pembuatan Kebijakan (Peraturan Perundang - undangan, dll)
4. Data Kerangka Regulasi
5. Data Hasil Evaluasi Kebijakan/Data Persetujuan
6. Data Kerjasama
7. Data Kunjungan Kerja

Salah satu strategi dalam implementasi program satu data Kabupaten Mimika dengn penyusunan data warehouse di Kabupaten Mimika sudah direncanakan sebelumnya. Penyusunan data warehouse di Kabupaten Mimika dimulai dengan melakukan identifikasi database dengan pengelompokan sebagai berikut

1. *Database* Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.
2. *Database* Kelembagaan dan Tata Laksana
3. *Database* SDM Aparatur
4. *Database* Pelayanan Publik
5. *Database* Aset, Keuangan dan Anggaran
6. *Database* Kepegawaian

7. Database Kebijakan dan regulasi

3.2.2 Metadata Arsitektur Data dan Informasi

Data yang diperoleh dari bagian Datin yaitu data umum yang ada di sekretariat dan data khusus yang ada di organisasi perangkat daerah saat ini belum memiliki metadata sebagaimana yang disyaratkan dalam Rancangan Perpress SPBE nasional. Oleh karena itu, perlu disusun meta data dari masing-masing data tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3-2 terkait dengan Atribut Metadata Data dan Informasi.

Tabel 3 - 2 Atribut Metadata Data dan Informasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya antara lain: 1. Data Induk/Master itu data yang bisa diubah atau bisa bertambah; 2. Data referensi itu data yang tdk bisa diubah seperti wilayah; dan 3. Data transaksi adalah data yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dalam sistem ERP yang khas, data transaksional adalah data yang terkait dengan penjualan, pengiriman, piutang, dan peristiwa lain yang mungkin atau mungkin tidak melibatkan transaksi moneter. Data transaksi biasanya dapat digambarkan dengan

		kata kerja
5	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Merupakan penanggung jawab data

Data yang diperoleh dari bagian Datin yaitu data umum yang ada di sekretariat dan data khusus yang ada di organisasi perangkat daerah saat ini belum memiliki metadata sebagaimana yang disyaratkan dalam Rancangan Perpres SPBE nasional. Oleh karena itu, perlu disusun meta data dari masing-masing data tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Daftar Data dan Informasi serta metadatanya ditunjukkan pada Tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2 Metadata Data dan Informasi

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
MKB-DAD.01	Data Kependidikan	Data terkait ruang lingkup Pendidikan	Sebagai informasi dan dokumentasi terkait kependidikan	Terbuka	Data Statistik	Enam Bulanan	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.02	Data Kependudukan	Data terkait kependudukan Kabupaten Mimika	Informasi dan Dokumentasi terkait kependudukan Kabupaten Mimika	Tertutup	Data Statistik	Lima Tahunan	DISDUKCAPIL Kabupaten Mimika
MKB-DAD.03	Data Kesehatan	Data seputar kesehatan	Informasi dan Dokumenasi terkait aktifitas Kesehan di Kabupaten Mimika	Terbuka	Data Statistik	Realtime	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.04	Data Perhubungan	Data terkait kegiatan perhubungan Kabupaten Mimika	Informasi dan dokumentasi terkait kegiatan perhubungan di Kabupaten Mimika	Terbatas	Data Statistik	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.05	Data Rencana Pembangunan Daerah	Data seputar rencana pembangunan Kabupaten Mimika	Informasi dan dokumentasi rencana pembangunan lingkup Kabupaten Mimika	Terbatas	Data Statistik	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.06	Data TIK	Data terkait teknologi	Informasi dan	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO

		informasi	dokumentasi Teknologi dan Informasi Kabupaten Mimika				Kabupaten Mimika
MKB- DAD.07	Data Pelaksanaan SPBE	Data seputar pelaksanaan SPBE		Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.08	Data Penanggulangan Bencana	Data seputar kebencanaan	Informasi dan dokumentasi terkait kejadian dan penanggulangan bencana Kabupaten Mimika	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.09	Data Bina Marga dan Pembangunan Daerah	Data terkait kegiatan Bina Marga dan Pembangunan Daerah	Informasi dan dokumentasi kegiatan Bina Marga dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB- DAD.10	Data Ketertiban	Data ketertiban Kabupaten Mimika	Informasi dan Dokumentasi terkait pelaksanaan ketertiban di Kabupaten Mimika	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB- DAD.11	Data Peraturan dan Pemerintahan	Data terkait peraturan dan kegiatan pemerintahan	Informasi dan dokumentasi terkait peraturan dan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mimika	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB- DAD.12	Data Kesatuan Bangsa dan Politik	Data terkait kegiatan Kesatuan Bangsa dan	Informasi dan dokumentasi terkait data pokok pelaksanaan	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika

		Politik	urusan pemerintahan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan bidang politik pemerintah Kabupaten Mimika				
MKB- DAD.13	Data Sosial dan Masyarakat	Data terkait kegiatan sosial kemasyarakatan	Informasi dan dokumentasi terkait kegiatan sosial kemasyarakatan Kabupaten Mimika	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB- DAD.14	Data Pemukiman	Data terkait pemukiman	Informasi dan Dokumentasi terkait pemukiman di Kabupaten Mimika	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.15	Data Informasi	Data Terkait Informasi Umum	Pemberian informasi publik	Terbuka	Data Statistik	Realtime	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB- DAD.16	Data Layanan	Data terkait layanan	Informasi dan Dokumentasi terkait layanan di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.17	Data Anggaran	Data terkait anggaran	Informasi dan dokumentasi anggaran Kabupaten Mimika	Tertutup	Data Keuangan	Enam Bulanan	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB- DAD.18	Data Kegiatan	Data terkait kegiatan di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten	Informasi dan dokumentasi kegiatan di ruang lingkup	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	DISKOMINFO Kabupaten Mimika

		Mimika	Pemerintah Kabupaten Mimika				
MKB- DAD.19	Data Kinerja	Data terkait kinerja pegawai	Informasi dan Dokumentasi terkait Kinerja SDM Kabupaten Mimika	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	DISKOMINFO Kabupaten Mimika
MKB-DAD.20	Data Reformasi Birokrasi	Data seputar reformasi birokrasi	Informasi dan dokumentasi data terkait reformasi birokrasi Kabupaten Mimika	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	DISKOMINFO Kabupaten Mimika

Bab 4 Arsitektur Layanan

4.1 Struktur dan Referensi Arsitektur Layanan

Menurut Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE, layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sementara yang dimaksud dengan pengguna SPBE adalah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Jadi, layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan untuk para penggunanya.

Di dalam domain arsitektur layanan SPBE yang mendukung arah kebijakan nasional, dilakukan klasifikasi dari substansi layanan SPBE ke dalam empat tingkat struktur arsitektur layanan SPBE, yaitu sebagai berikut.

- (1) Domain Layanan, mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintah sebagai tingkat pertama yang menjadi struktur di tingkat nasional
- (2) Area Layanan, menjelaskan mengenai area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan yang dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat kedua yang menjadi struktur di tingkat nasional
- (3) Kategori Layanan, menjelaskan mengenai layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional sebagai tingkat ketiga
- (4) Sub kategori Layanan, menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat keempat. Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah dapat Menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

4.1.1. Prinsip Arsitektur Layanan

Prinsip-prinsip pengembangan arsitektur layanan:

Prinsip proses bisnis dalam arsitektur SPBE bersifat konsisten dan komprehensif, serta adaptif dalam mengikuti kebutuhan stakeholder dan perubahan regulasi, serta dilakukan secara

berkesinambungan. Penyusunan arsitektur proses bisnis ini mengacu kepada proses bisnis di tingkat nasional dengan tujuan untuk membentuk layanan SPBE. Oleh karena itu, prinsip pengembangan arsitektur layanan SPBE ini juga mengacu pada prinsip proses bisnis dalam arsitektur SPBE ini.

Arsitektur layanan Kabupaten Mimika menggambarkan layanan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kabupaten Mimika dengan acuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020. Arsitektur layanan juga disusun dengan mengacu pada rancangan Peraturan Presiden tahun 2021 tentang Arsitektur SPBE Nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1.1.



Gambar 4.1.1 Struktur arsitektur layanan

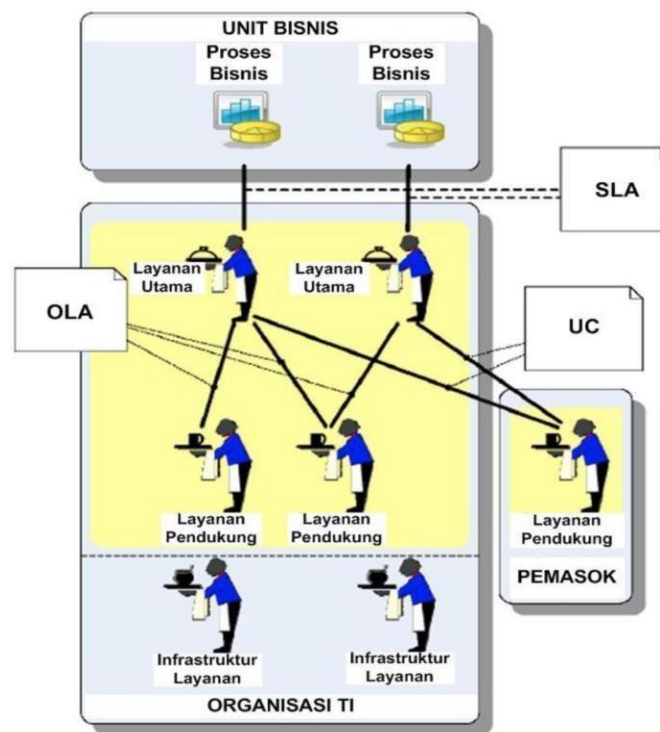
Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

4.1.2. Referensi Layanan Tingkat Nasional

Kapabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti organisasi, orang, ataupun sistem yang ada di lingkungan Kabupaten Mimika untuk keberhasilan realisasi Layanan SPBE secara digital. Kapabilitas layanan diwujudkan dengan cara pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan. Bentuk konkritnya berupa klasifikasi dan identifikasi layanan berdasarkan proses utama dan pendukung di Kabupaten Mimika untuk mendefinisikan hasil berupa kebutuhan aplikasi, fungsi aplikasi dan komponen aplikasi atau dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. dari hasil akumulasi setiap elemen dalam tahapan peta jalan adalah dapat terealisasinya Visi, Misi SPBE,

arah kebijakan SPBE, tujuan SPBE, dan sasaran SPBE sebagai acuan kapabilitas serta mempengaruhi inisiatif strategis, yang berujung pada (a) Layanan Publik dan (b) Layanan Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Cetak Biru (Blue Print) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kapabilitas layanan SPBE memerlukan kombinasi organisasi dan aset yang berbeda, seperti SDM, proses, dan teknologi untuk dicapai, sehingga dapat mewujudkan tujuannya. Kapabilitas SPBE yang masih abstrak kemudian direalisasikan oleh komponen teknis yang bersifat lebih konkret. Dalam konteks penyediaan layanan di Kabupaten Mimika, kebutuhan ini dapat didefinisikan melalui pemetaan unsur organisasi dan asetnya secara rinci dan menyeluruh dalam Daftar Pekerjaan Solusi sebagai Inisiatif Strategis Layanan SPBE. Berdasarkan pemetaan unsur organisasi secara rinci dan menyeluruh, fungsi dan proses bisnis Kabupaten Mimika diklasifikasikan seperti terlihat pada Gambar 3. Proses klasifikasi ini tujuannya adalah untuk menetapkan utility bagi penyediaan layanan, serta dukungan terhadap customer assets dan penyebaran *service assets*.



Gambar 4.1.2 Klasifikasi Layanan Kabupaten Mimika

Berdasarkan proses klasifikasi tersebut, dapat teridentifikasi layanan yang harus disediakan untuk setiap proses bisnis di dalam setiap unit bisnis Kabupaten Mimika. Metode klasifikasi ini

juga digunakan untuk penetapan service level agreements (SLA), operational level agreements (OLA) dan underpinning contract (UC) untuk pengelolaan tingkat layanan (*warranty*). Setiap layanan yang teridentifikasi ditetapkan dukungan kinerjanya atau penurunan hambatannya (*utility*) melalui penetapan kategori dan sub kategori layanan, serta komponen lainnya (*service assets*). Setiap *service assets* berupa aplikasi, data, infrastruktur, keamanan, beserta rincian setiap komponennya akan dibahas pada Bab selanjutnya laporan ini. Penetapan metadata dan tipe layanan di lingkungan Kabupaten Mimika didefinisikan berdasarkan klasifikasi dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat tingkat:

Domain Layanan, mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional. Area Layanan, menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Kategori Layanan menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD (Kabupaten Mimika) sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga).

Sub Kategori Layanan menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD (Kabupaten Mimika) pada tingkatan struktur ini dapat menyusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

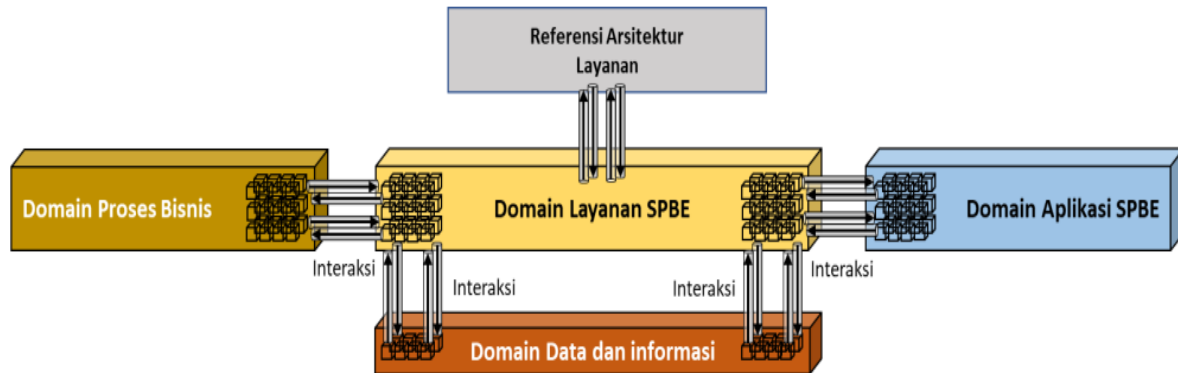
Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibuat kodifikasi yang disesuaikan dengan proses bisnisnya dan referensi arsitektur layanan SPBE Nasional yang dapat dilihat pada subab berikut.

4.1.3. Keterkaitan Antar Domain

Salah satu kemampuan dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Mimika saat ini, selain terdapat beberapa layanan aplikasi dan dukungan infrastruktur teknologi, Kabupaten Mimika juga telah memiliki standar layanan yang diatur berdasarkan Keputusan Kabupaten Mimika Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Kabupaten Mimika. Di dalam keputusan tersebut terdapat deskripsi terkait layanan yang ada di Peta Proses Bisnis Kabupaten Mimika.

Standar pelayanan merupakan implementasi dari strategi pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Mimika yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi instansi daerah.

Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



Gambar 4.1.3 Keterkaitan Antar Domain Layanan

4.2. Layanan Kabupaten Mimika

4.2.1. Identifikasi Kebutuhan Layanan

Identifikasi kebutuhan layanan SPBE terdiri dari daftar pekerjaan solusi berupa layanan aplikasi pemerintahan yang pelaksanaannya direalisasikan ke dalam tahapan peta jalan dan terkait dengan kapabilitasnya. Daftar pekerjaan solusi adalah kumpulan kapabilitas yang akan datang, yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE dan dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE. Daftar pekerjaan solusi juga merupakan bagian dari identifikasi kebutuhan layanan SPBE.

Layanan yang ada di Kabupaten Mimika perlu diidentifikasi berdasarkan proses bisnis yang ada. Layanan aplikasi pemerintah di lingkungan Kabupaten Mimika telah diterapkan di beberapa proses utama dan pendukungnya, namun untuk menentukan kapabilitas kebutuhan layanan yang akan datang, perlu diidentifikasi secara rinci dengan melakukan pemetaan terhadap atribut Metadata Arsitektur Layanan SPBE.

4.2.2. Metadata Arsitektur Layanan

Layanan yang diinginkan di lingkungan Kabupaten Mimika berdasarkan hasil kodifikasi dan klasifikasi metadata layanan pada Tabel 4.2.1 telah diarahkan untuk mencapai tujuan SPBE. Arsitektur layanan Kabupaten Mimika yang diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, meliputi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. Tahapan Klasifikasi tipe layanan ini mengacu pada

hasil analisis pemetaan berdasarkan proses bisnis dan metadata layanan SPBE, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1 menunjukkan metadata layanan Kabupaten Mimika berdasarkan tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE. Entitas metadata ini berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Entitas metadata arsitektur layanan SPBE Kabupaten Mimika berhubungan dengan arsitektur aplikasi SPBE sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut.

Daftar Layanan dan metadatanya ditunjukkan pada Tabel 4-1

Tabel 1.4. Metadata Layanan
Kabupaten Mimika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.25.02.01	Layanan Pengawasan Obat dan Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.02	Layanan Pengawasan, pencatatan sarana, prasarana dan alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Farmasi Dan Alat Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.25.02.03	Layanan pelaporan data KIA	Bidang Kesehatan masyarakat	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.06 Pengendalian Penyakit
MKB-DAL.01.25.02.04	layanan Pelaporan gizi	Bidang Kesehatan masyarakat	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.05	Layanan Informasi Kesehatan	Bidang Kesehatan masyarakat	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

	Daerah					Sehat			n

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.06	Layanan Penanggulangan AKI-AKB	Bidang Kesehatan masyarakat	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.07	Layanan Pemantauan Kesehatan di Tempat-tempat Umum	Dinas Kesehatan (Bidang Sumber Daya Kesehatan)	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.25.02.08	Layanan Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.09	Layanan Pencatatan Pengelolaan Tempat Pengolahan Makanan	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layana n Publik	RAL.01.2 ⁵ Kesehata n	RAL 01.25.02 Kesehata n Masyara k at
MKB-DAL.01.25.02.10	Layanan Verifikasi Kabupaten Kabupaten sehat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layana n Publik	RAL.01.2 ⁵ Kesehata n	RAL 01.25.02 Kesehata n

[illegible]

MKB-DAL.01.25.02.11	Layanan Jaminan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.12	Layanan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)

MKB-DAL.01.25.02.13	Layanan Sistem Informasi Tenaga Kesehatan	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.14	Layanan Pengawasan pangan rumah tangga	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.15	Layanan Pengawasan obat	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.16	Layanan Pencatatan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.17	Layanan Sistem informasi pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	m Covid-19,update kesembuhan dan kematian kasus Covid-19								
MKB-DAL.01.25.02.18	Layanan Sistem Informasi Imunisasi Kabupaten Mimika	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.19	Layanan Sistem Informasi	Dinkes (Bidang Pencegahan dan	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Pencatatan & Pelaporan Kasus Potensial KLB / Wabah	Pengendalian Penyakit)				Perilaku Bersih dan Sehat			n Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.20	Layanan Informasi penyakit Diare	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.22	Layanan Informasi penyakit Demam Berdara h Dengue	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layana n Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyara k at
MKB-DAL.01.25.02.23	Layanan informasi Pencatatan pelaksanaa npromosi kesehatan	Dikes (Bidang Kesehatan Masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layana n Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan n Masyara k at

ID	Nama Layana n	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layana n	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)

MKB-DAL.01.25.02.24	Layanan Informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.25	Layanan Farmasi	Bidang Penunjang Medik	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.26	Layanan Penunjang	Bidang Penunjang Medik	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.27	Layanan Administrasi	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.28	Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.25.02.29	Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.30	Pelayanan Keperawatan Kamar Operasi	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.31	Pelayanan Keperawatan Kamar Bersalin	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.2 ⁵ Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.32	Pelayanan Keperawatan Perinatologi	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.2 ⁵ Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.33	Pelayanan Keperawatan Intensif	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.25.02.34	Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.37	Pelayanan Rawat Inap	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.38	Pelayanan Rawat Inap Intensif	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)

MKB-DAL.01.25.02.39	Pelayanan Rawat Jalan Spesialis	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.40	Pelayanan Rawat Inap Isolasi	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.41	Pelayanan Gawat Darurat	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.42	Pelayanan Kamar Operasi	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Non Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.43	Pelayanan PONEK	Bidang Pelayanan	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.25.02.44	Layanan Laboratorium	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.45	Layanan Radiologi	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.46	Layanan Farmasi Rawat Inap	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.47	Layanan Farmasi Rawat Jalan	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.48	Layanan Gizi Konsultasi Gizi (Rawat Jalan & Rawat Inap)	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.2 ⁵ Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.25.02.49	Layanan nCSSI	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.2 ⁵ Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

MKB-DAL.01.25.02.50	Layanan Anestesi	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.2 ⁵ Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.51	Layanan Rehab Medik	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.2 ⁵ Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

[illegible]

MKB-DAL.01.25.02.52	Billing System (Pembayaran pasien)	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.53	Pendaftaran khusus pasien lama online	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)

MKB-DAL.01.25.02.54	Skrining pengunjungrsud	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih danSehat	RAL.01 Layana n Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan n Masyara k at
MKB-DAL.01.25.02.55	Pendaftara nvaksin di rsud	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih danSehat	RAL.01 Layana n Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan n Masyara k at
MKB-DAL.01.25.02.56	ERM khusus pasien radiologi khusus	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektro nik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih danSehat	RAL.01 Layana n Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan n

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dokter radiologi								Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.57	Sistem informasi manajemen rumah sakit (internal petugas rs)	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.25.02.58	mutu, kinerja, skpkhusus perawat	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.25.02.59	Pendaftaran pasien baru	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
MKB-DAL.01.23.01.01	Penyusunan Perbup Kependudukan	Bagian Hukum Setda	Hukum	Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk

MKB-DAL.01.23.02.01	PenyusunanGrand Design Kependudukan	Bappeda	Keluarga Berencana	Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.23.02.02	Parameter Kependudukan	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

MKB-DAL.01.23.02.03	Parameter Kependudukan	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.2 ³ Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.04	Parameter Kependudukan	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.2 ³ Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)

MKB-DAL.01.23.02.05	Parameter Kependudukan	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.06	Penyaluran Obat	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.07	Penyuluhan	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.23.02.08	Pembinaan	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.09	Sarana Kb	BKKBN	Keluarga Berencana	Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.10	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.23.02.1 1	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.1 2	Penyaluran Obat	Fasilitas Kesehatan Pratama	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.1 3	Pelayanan Akseptor	Satuan Pelayanan KB dan Faskes	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.23.02.1 4	Pembinaan Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Pratama	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.1 5	Konseling	Kelompok Remaja	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.1 6	Pebinaan Kampung	Desa	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.23.02.1 7	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.1 8	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.1 9	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.23.02.20	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.23.02.21	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
MKB-DAL.01.07.02.01	Pelayanan Pasif (Pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan	UPT Pusat Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dimana pemilik hewan membawa hewan ke Puskesmas)								
MKB-DAL.01.07.02.02	Penyediaan Statistik Pertanian	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pertanian	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.03	Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pertanian	Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.07.02.04	Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK pupuk bersubsidi	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.05	ijin edar Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.07.02.06	Toko Tani Indonesia (TTI)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.07	Rekom Ijin Perumahan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.08	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.07.02.09	Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.10	Setifikat Good Manufacturing Practise (GMP) 2021	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.11	statistik Perikanan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.07.02.1 2	Layanan aktif kesehatan masyarakat veteriner	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.1 3	Rekomendasi Hewan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.1 4	Rekomendasi Produk Hewan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.1 5	Rekomendasi NKV	Bidang Ketahanan		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		Pangan dan Pertanian				Derajat Kesehatan Masyarakat			Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.1 6	Sistem Informasi Pasar Online Nasional Ternak	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.1 7	Layanan Inseminasi Buatan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.1 8	Jasa Pemotongan Hewan (sapi, kerbau)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.07.02.19	Jasa Pemotongan Unggas	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.20	Jasa Angkutan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.21	Jasa Sewa Kandang	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.22	Penyediaan benih ikan konsumsi (nila,	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	gurame, lele, mas, tawes)								
MKB- DAL.01.07.02.2 3	Pelayanan Aktif (pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan di tempat pemilik ternak)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB- DAL.01.07.02.2 4	Jasa Angkutan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.07.02.2 5	Jasa Sewa Kandang	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.07.02.2 6	Penyediaan benih ikan konsumsi (nila, gurame, lele, mas, tawes)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	MKB-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
MKB-DAL.01.34.01.0 1	Layanan Penyelenggaraan Pengembangan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Non Elektronik	MKB-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Wirausaha Pemuda								
MKB-DAL.01.34.01.02	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Lembaga Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Non Elektronik	MKB-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda
MKB-DAL.01.34.01.03	Layanan Informasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yang diikuti	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Non Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	oleh Satuan Pendidikan Dasar								
MKB-DAL.01.34.01.04	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Lembaga Olahraga	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda
MKB-DAL.01.34.01.05	Layanan Informasi Penyelenggaraan, Pengembangan dan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi								
MKB-DAL.01.34.01.06	Layanan Informasi Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kabupaten	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.34.01.07	Layanan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda
MKB-DAL.01.34.01.08	Layanan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	MKB-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Depend ency)	→ RAL Level 2 (Depend ency)	→ RAL Level 3 (Depend ency)
MKB- DAL.01.17.01.0 1	Layanan data jalan dan jembatan	Bidang Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik	Elektronik	MKB-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
MKB- DAL.01.17.01.0 2	Informasi Kesesuaian Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Internal	Elektronik	MKB-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
MKB- DAL.01.17.01.0 3	Layanan Sistem Informasi Pembinaan	Bidang Bina Kontruksi	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik	Elektronik	MKB-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Jasa Konstruksi					Infrastruktur dan transportasi			Prasarana Strategis
MKB-DAL.01.17.01.04	Pelayanan Rekomendasi Utilitas	Bidang Bina Kontruksi	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik	Non Elektronik	MKB-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
MKB-DAL.01.17.01.05	Layanan Sewa Alat Berat	UPT Peralatan dan Perbengkelan	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik, Internal	Elektronik	MKB-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.17.01.06	Sedot WC Aman Dan Terjadwal	UPT Pengelolaan Limbah Terpadu	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik, Internal	Elektronik	MKB-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
MKB-DAL.01.40.04.01	Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPPLH	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.04.02	Fasilitasi Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.03	Fasilitasi Penyusunan Dokumen KLHS RDTR	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.04.04	Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPPLH RPJMD	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.05	Informasi Indeks Kualitas Air	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.04.06	Informasi Indeks Kualitas Udara	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.01.01	Informasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.01 Dampak Perubahan Iklim

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.04.07	Informasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup	UPTD Laboratorium	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.08	Informasi Penghentian Pencemaran / Kerusakan Lingkungan	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.04.09	Informasi Pemulihan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.10	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kehati	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.02.01	Informasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.5 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Publik PerKabupatenan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem
MKB-DAL.01.40.04.11	Informasi Sarana dan Prasarana Kehati	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.5 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Publik PerKabupatenan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.04.1 2	Fasilitasi Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Bidang PPL	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.1 3	Pengawasan Kegiatan pada Pelaku Usaha	Bidang PPL	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.04.1 4	Informasi Kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.1 5	Informasi Kegiatan Kampanye Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.04.1 6	Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.1 7	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Bidang PPL	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.18	Pelayanan Penyelesaian Sengketa	Bidang PPL	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.19	Pelayanan Verifikasi Lapangan Pengelolaan Limbah B3	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.20	Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.21	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.2 2	Pelayanan Pengurangan Sampah	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.2 3	Pelayanan Penanganan Sampah	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.24	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
MKB-DAL.01.40.04.25	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	MKB-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
MKB-DAL.01.20.03.01	Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Adpem	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.03 Perumahan Rakyat
MKB-DAL.01.20.03.02	Bidang permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mimika Tidak	Bidang Pemukiman	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.03 Perumahan Rakyat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	mempunyai daftar pemetaan layanan								
MKB-DAL.01.20.01.01	Verifikasi Perhitungan Konstruksi	Bidang Tata Bangunan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di KawasanPerumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman
MKB-DAL.01.20.01.02	Pendataan Aset Bangunan (sudah dibangun, butuh rehab	Bidang Tata Bangunan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Adpem	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di KawasanPerumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan intervensi pemerintah, Jumlah Bangunan di Mimika								
MKB- DAL.01.20.02.0 1	Penyelenggaraan SLF	DISRUMKIM Bidang Tata Bangunan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman
MKB- DAL.01.20.02.0 2	Layanan Pengadaan Lahan	DISRUMKIM Bidang Pertanahan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Adpem	Non Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						KawasanPerumahan dan Permukiman			Permukiman
MKB-DAL.01.20.02.03	Layanan Retribusi Rusunawa	UPT Rusunawa	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di KawasanPerumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman
MKB-DAL.01.20.01.03	Layanan Token Listrik Penghuni Rusunawa	UPT Rusunawa	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di KawasanPerumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.20.02.04	Layanan Aduan Penghuni Rusunawa	UPT Rusunawa	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman
MKB-DAL.01.20.01.04	Layanan penyediaan lahan makam	UPT Pemakaman	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman
MKB-DAL.01.20.01.05	Pelayanan Mobil jenazah	UPT Pemakaman	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	MKB-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Kawasan Perumahan dan Permukiman			Permukiman
MKB-DAL.01.31.03.01	Layanan Informasi BOS SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
MKB-DAL.01.31.03.02	Layanan Informasi PPDB Online jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.03.03	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
MKB-DAL.01.31.03.04	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.03.05	Layanan Informasi Program Indonesia Pintar jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
MKB-DAL.01.31.03.06	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.03.07	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
MKB-DAL.01.31.03.08	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.03.09	Layanan Legalisir Ijazah jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
MKB-DAL.01.31.03.10	Layanan Rekomendasi Mutasi Peserta Didik jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.03.1 1	Layanan Informasi BOS SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
MKB-DAL.01.31.05.0 1	Layanan Informasi PPDB Online jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.05.02	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
MKB-DAL.01.31.05.03	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.05.04	Layanan Informasi Program Indonesia Pintar jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
MKB-DAL.01.31.05.05	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB- DAL.01.31.05.0 6	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
MKB- DAL.01.31.05.0 7	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.0 5.08	Layanan Legalisir Ijazah jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
MKB-DAL.01.31.0 5.09	Layanan Rekomendasi Mutasi Peserta Didik jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.02.01	Layanan Informasi BOP PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini
MKB-DAL.01.31.02.02	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.02.03	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini
MKB-DAL.01.31.02.04	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.04.0 1	Layanan Informasi BOP Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
MKB-DAL.01.31.04.0 2	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.04.03	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
MKB-DAL.01.31.04.04	Layanan Informasi Program Indonesia Pintar jenjang Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.04.05	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang Pendidikan Kesenakaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
MKB-DAL.01.31.04.06	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang Pendidikan Kesenakaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.04.07	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
MKB-DAL.01.31.04.08	Layanan Legalisir Ijazah Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.04.09	Layanan Rekomendasi Mutasi Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
MKB-DAL.01.31.04.10	Layanan Informasi Kurikulum Mulok jenjang Pendidikan Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.04.1 1	Layanan Informasi Kurikulum Mulok jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
MKB-DAL.01.31.04.1 2	Layanan Pengajuan Nomor Unik Pendidik tenaga kependidikan (NUPTK)	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.01.0 1	Layanan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB)	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
MKB-DAL.01.31.01.0 2	Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Kependidikan
MKB-DAL.01.31.01.03	Layanan Pembuatan SK Dinas untuk GTK Non PNS	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
MKB-DAL.01.31.01.04	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Nasional jenjang Pendidikan Dasar					dan Non Formal (<i>Smart People</i>)			
MKB- DAL.01.31.03.1 1	Layanan Rekomenda si Izin Operasional Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektron ik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidika n	RAL 01.31.03 Pendidika n Dasar
MKB- DAL.01.31.02.0 5	Layanan Pengajuan Nomor Pokok	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektron ik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidika n	RAL 01.31.02 Pendidika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Sekolah Nasional jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan					Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)			n Anak Usia Dini
MKB-DAL.01.31.02.06	Layanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.31.06.0 1	Layanan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	MKB-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (<i>Smart People</i>)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.06 Pendidikan Non-Formal
MKB-DAL.01.27.01.0 1	Layanan Penyajian data Gender dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Adpem	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.27.03.0 1	Layanan Pencegahan Kekerasan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan
MKB-DAL.01.27.03.0 2	Layanan Penanganan Perlindungan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Adpem	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.27.01.02	Layanan Data Gender dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender
MKB-DAL.01.27.02.02	Layanan Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik	Elektronik	MKB-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak
MKB-DAL.01.31.08.01	Layanan Peminjaman Sumber Belajar	Bidang Perpustakaan	Arsip dan Perpustakaan	Publik	Elektronik	MKB-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Kepustakaan
MKB-DAL.01.31.08.02	System Information Management	Bidang Perpustakaan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
MKB-DAL.01.31.08.03	Portal Pernaskahan Nusantara	Bidang Perpustakaan	Arsip dan Perpustakaan	Publik	Elektronik	MKB-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.04.09.01	Layanan Kearsipan Dinamis Menggunakan Aplikasi SRIKANDI	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.04.09.02	Layanan Kearsipan Statis Menggunakan Aplikasi SRIKANDI	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.04.09.03	Layanan Informasi Arsip Dinamis	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Publik	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	(JIKN) dan Statis Secara Nasional (SIKN)					Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.04.09.04	Layanan Usul Musnah	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.04.09.05	Layanan Restorasi Arsip	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.04.09.06	Layanan Akuisisi Arsip	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.04.09.07	Layanan Digitalisasi Arsip	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.04.09.08	Layanan Subanglaring	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.04.09.09	Layanan Subanglaring	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.02.01.01	Pelayanan Administrasi Pemerintahan.tentang	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	penyusunan dokumen kebijakan, rencana dan program tahunan maupun jangka menengah, serta untuk melakukan analisis data dan informasi pemerintahan						Pemerintahan		Pengelola Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.02.01.02	Pelayanan Administrasi tentang Pemerintahan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara
MKB-DAL.02.02.01.03	Pelayanan Administrasi Pemerintahan terkait	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	monitoring dan evaluasi pelaksanaan /realisasi program/kegiatan/subkegiatan sesuai perencanaan yang ada dalam satu tahun anggaran						Pemerintahan		Pengelola Keuangan Negara
MKB-DAL.02.02.01.04	Pelayanan Administrasi Pemerintah	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningkatkan	RAL.02 Layanan Administr	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksa

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	an dalam rangka mendukung Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah					Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	asi Pemerintahan		an Pengelola Keuangan Negara
MKB-DAL.02.02.01.05	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	n dan pendanaan								
MKB-DAL.02.02.01.06	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
MKB-DAL.02.02.01.07	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	rangka penyusunan dokumen kebijakan, rencana dan program tahunan maupun jangka menengah sektoral, serta untuk melakukan analisis data dan informasi						Pemerintahan		Pengelola Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	pemerintahan sektor Infrastruktur dan Kewilayahan, sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam, serta Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.02.01.08	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka dokumen kebijakan dan rencana pada sektor Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	an dan pengkajian peraturan, Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan								

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	pembangunan, Pengembangan Inovasi dan teknologi								
MKB-DAL.02.02.01.09	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka memberikan dukungan untuk Pusat Jejaring Inovasi	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	MKB-02.3 Meningatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah (Puja Indah)								
MKB- DAL.01.29.06.0 1	Layanan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum
MKB- DAL.01.29.06.0 2	Layanan Pelaporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.29.06.03	Layanan penanganan aksi unras	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum
MKB-DAL.01.29.06.04	Layanan pendataan linmas inti	Bidang Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.29.06.05	Layanan Bantu Trantibum dan Kebencanaan	Bidang Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum
MKB-DAL.01.29.06.06	Layanan Diklat PPPNS dan TRC	Bidang Sumber Daya Aparatur	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.29.06.07	Layanan Informasi Penegakan Perda dan Perkada	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum
MKB-DAL.01.29.06.08	Layanan Pelaporan Penegakan Perda dan Perkada	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.26.01.01	Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Terlantar di Luar Panti melalui LKSA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.02	Pemantauan anak-anak terlantar pada LKSA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.26.02.0 1	Layanan pendataan DTKS bagi Fakir Miskin dan layanan pendataan 26 PPKS	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin
MKB-DAL.01.26.02.0 2	Pendataan PPKS pada Sistem layanan rujukan terpadu	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin
MKB-DAL.01.26.02.0 3	Layanan Fakir Miskin yang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	mendapatkan bantuan BPNT dan PKH								an Fakir Miskin
MKB-DAL.01.26.02.04	Layanan pemberian bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga Fakir Miskin	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.26.01.03	Layanan pemberian pendampingan dan pemulangan warga negara migran yang bermasalah	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.04	Layanan penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpul	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	n uang atau barang								
MKB-DAL.01.26.01.05	layanan pembinaan bagi seluruh anggota PSM	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Non Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.06	Layanan pembinaan bagi seluruh anggota TKSK	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.07	Layanan pembinaan bagi orsos	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan Karang Taruna								Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.08	Layanan pendampingan psikososial bagi anak dan keluarga korban tindak kekerasan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.09	Layanan rehabilitasi 5 lokasi	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	TMP/ 2 monumen					Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat			Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.10	Layanan pemeliharaan 5 lokasi TMP/2 monumen	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.11	Layanan pemberian makanan bagi Penyandang Disabilitas	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
MKB-DAL.01.26.02.05	Layanan pemberian sandang bagi Penyandang Disabilitas	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
MKB-DAL.01.26.01.1 2	Layanan pemberian alat bantu bagi Disabilitas	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Publik	Non Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	terlantar di luar panti								
MKB-DAL.01.26.02.06	Layanan bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Non Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
MKB-DAL.01.26.02.07	layanan bimbingan sosial bagi keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Non Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								
MKB-DAL.01.26.01.13	Layanan data dan pengaduan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.14	Layanan kedaruratan bagi PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.26.01.1 5	Layanan rujukan bagi PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.1 6	layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial								
MKB- DAL.01.26.01.1 7	Layanan kerjasama antar lembaga atau MOU	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Publik	Non Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB- DAL.01.26.01.1 8	Layanan penyediaan makanan untuk	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Adpem	Non Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	korban bencana alam dan sosial								Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.19	layanan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana alam dan sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Adpem	Non Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.26.01.20	layanan sosialisasi kampung siaga bencana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Non Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.21	layanan koordinasi dan sosialisasi tagana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	MKB-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.05.01.01	Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi pada Sektor Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	MKB-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.01 Manajemen Ekonomi Kreatif

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.15.01.01	Informasi Kepariwisataa an dan Kebudayaan	Bidang Pemasaran	Pariwisata	Publik	Elektronik	MKB-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisataa an
MKB-DAL.01.15.01.02	Pemberian Alat Kesenian Kepada Seniman	Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	MKB-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisataa an
MKB-DAL.01.15.01.03	Pemberian Penghargaan n / Uang Kadedeuh	Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	MKB-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kepada Seniman dan Budayawan								Kepariwisata
MKB-DAL.01.15.01.04	Pelatihan Seni Budaya	Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	MKB-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisata
MKB-DAL.01.15.01.05	Digitalisasi Sejarah	Disparbud Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Elektronik	MKB-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisata

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.15.03.0 1	Pembinaan dan Pemberian Honorarium Juru Pelihara Situs	Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	MKB-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata
MKB-DAL.01.15.03.0 2	Informasi obyek wisata dan Monitoring tiket Obyek Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Adpem	Elektronik	MKB-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata
MKB-DAL.01.24.02.0 1	Layanan Fasilitas i Pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta	RAL 01.24.02

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Otonomi Daerah					Pertumbuhan Ekonomi		han daerah	Otonomi Daerah
MKB-DAL.01.24.02.02	Informasi administrasi pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.02.03	Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kewilayah an	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.08.08.01	pelayanan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama
MKB-DAL.02.08.08.02	Pelayanan Fasilitas Kerja Sama Pihak Ketiga	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.08.08.03	pelayanan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama
MKB-DAL.02.08.08.04	Layanan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Agama	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.26.01.2 1	Layanan Bantuan Sosisal	Dinas Sosial	Agama	Publik	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.26.01.2 2	Bantuan Beasiswa SMA dan Perguruan tinggi	Sekretariat Daerah	Pendidikan	Adpem	Non Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
MKB-DAL.01.24.06.0 1	Layanan Fasilitas Penyusunan Produk	Sekretariat Daerah	Hukum	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Hukum Daerah								Pemerintah Daerah
MKB-DAL.01.24.06.02	Pelayanan Fasilitas Bantuan hukum	Sekretariat Daerah	Hukum	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
MKB-DAL.01.24.06.03	Layanan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Hukum	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.06.04	Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MKB-DAL.01.24.06.05	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	RAL 01.14.02 Kebijakan Pengadaan Barang/Ja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									sa Pemerintah
MKB- DAL.01.14.02.0 1	Pelayanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa	Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	RAL 01.14.02 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MKB- DAL.01.24.03.0 1	Layanan Fasilitasi Penyusunan Program	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Pembangunan								Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.0 2	Layanan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.0 3	Layanan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.04	Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.05	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.06	layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.07	Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.08	Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.09	Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.10	pelayanan Penyusunan Perencanaaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.11	Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.1 2	Layanan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.1 3	Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.1 4	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.1 5	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.1 6	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.1 7	Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.1 8	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Peraturan Perundang-undangan								Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.1 9	Layanan Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.2 0	Layanan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.2 1	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.2 2	Layanan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.2 3	Layanan Pengadaan Kendaraan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pertumbuhan Ekonomi		han daerah	asi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.2 4	Layanan Pengadaan Mebel	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.2 5	Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kantor atau Bangunan Lainnya								Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.2 6	Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.2 7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.2 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.2 9	Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.3 0	layanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.3 1	layanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Operasional atau Lapangan								
MKB- DAL.01.24.03.3 2	Pelayanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah		Adpem	Non Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.3 3	Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat Daerah		Adpem	Non Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.3 4	Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat Daerah		Adpem	Non Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.3 5	pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Wakil Kepala Daerah								
MKB-DAL.01.24.03.3 6	Pelayanan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah		Adpem	Non Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.3 7	Pelayanan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.3 8	Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kepala Daerah								
MKB-DAL.01.24.03.3 9	Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.4 0	Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Sekretariat Daerah								
MKB-DAL.01.24.03.4 1	Pelayanan Fasilitas Keprotokolan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.4 2	Pelayanan Informasi Kinerja Sekretariat daerah/layanan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.4 3	Pelayanan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.4 4	Perencanaan & Pelaporan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.4 5	Layanan Penyusunan RKA	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.4 6	Layanan Penyusunan RKA Perubahan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administr asi Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.4 7	Layanan Penyusunan DPA	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administr asi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.4 8	Pelayanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.4 9	Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.5 0	Pelayanan Verifikasi dan Penatausah aan Keuangan	BPKAD		Adpem	Elektron ik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administr asi Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.5 1	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administr asi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.5 2	Layanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.5 3	Layanan Sistem Informasi manajemen dan Evaluasi	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Analisis Jabatan								
MKB-DAL.01.24.03.5 4	Layanan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.5 5	Layanan Peta Jabatan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.24.03.5 6	Pelayanan Pelaporan Kinerja pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.5 7	Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.01.24.03.5 8	Layanan Fasilitas Pelayanan Publik dan	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Tata Laksana								Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.5 9	Pelayanan Kompetisi Inovasi pelayanan Publik KemenPAN RB	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB- DAL.01.24.03.6 0	Pelayanan Kompetisi Inovasi pelayanan Publik KemenPAN	Jabar Kemenpan		Publik	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	RB Provinsi Jawa Barat								
MKB-DAL.01.24.03.6 1	Pelayanan Penilaian pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	MKB-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
MKB-DAL.02.06.09.0 1	Layanan Hibah Bantuan kepada Lembaga Mandatori dan Ormas	Bidang Kesatuan Bangsa	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Substantif Organisasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.06.09.02	Layanan Pendataan Ormas Kabupaten Mimika, Aktivitas Ormas dan Penerbitan Surat Keterangan Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasayarakatan	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Non Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Subtantif Organisasi
MKB-DAL.02.06.09.03	Layanan Pengaduan Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasayarakatan	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Subtantif Organisasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						dan Toleransi Masyarakat			
MKB-DAL.02.06.09.04	Layanan Bantuan Keuangan Parpol	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasayarakatan	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Non Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Subtantif Organisasi
MKB-DAL.02.06.09.05	Pendaftaran Rekomendasi Penelitian, Magang dan PKL	Sekretariat	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Non Elektronik	MKB-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Subtantif Organisasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.23.03.01	Penerbitan Akta Kelahiran,Akta Kematian,Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak,Akta Pengakuan Anak,Akta Pengangkatan Anak	Data SIAK Terpusat		Publik	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.23.03.02	Penyajian Data Kependudukan, Perekaman, Pengolahan, Dan Pemutakhiran Data	Data SIAK Terpusat		Publik	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil
MKB-DAL.01.23.03.03	Penyediaan Jaringan, Peralatan, dan Sistem Informasi serta Hak	Data SIAK Terpusat		Publik	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Akses Aplikasi								
MKB-DAL.01.23.03.04	Penerbitan Kartu Keluarga, KTP, SKPWNI, SKDWNl, Surat Datang dari Luar Negeri, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan	Data SIAK Terpusat		Publik	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Tempat Tinggal								
MKB-DAL.02.04.01.01	Manajemen Data Mandiri	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
MKB-DAL.02.04.01.02	Pelayanan Sistem informasi Manajemen ASN (SIM ASN)	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.04.01.03	Rekonsiliasi Data PNS	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
MKB-DAL.02.04.01.04	Peremajaan Data	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
MKB-DAL.02.04.01.05	Pelayanan Pemberhentian dan Pensiun	Bidang Pengadaan, Pemberhentian,		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	(BUP/APS/UZUR)	Dan Sistem Informasi				Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		
MKB-DAL.02.04.01.06	Pelayanan penerbitan SK pensiun janda/duda, bagi pns yang masih aktif	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
MKB-DAL.02.04.01.07	Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Suami (Karsu) dan	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kartu Istri (Karis) , Taspen								
MKB- DAL.02.04.01.0 8	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan ASN dan PPPK	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Publik	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
MKB- DAL.02.08.04.0 1	Layanan penyusunan Peraturan daerah	Persidangan dan Perundang-undangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									g- Undangan
MKB- DAL.02.08.04.0 2	Pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Program dan Keuangan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan
MKB- DAL.02.08.04.0 3	Pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Program dan Keuangan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									g- Undangan
MKB-DAL.02.08.04.04	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
MKB-DAL.02.08.04.05	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									g- Undangan
MKB- DAL.02.08.04.0 6	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan
MKB- DAL.02.08.04.0 7	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									g- Undangan
MKB- DAL.02.08.04.0 8	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan
MKB- DAL.02.02.04.0 1	Layanan Penganggaran	Bidang Anggaran		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.02.04.02	Layanan Perbendaharaan	Bidang Perbendaharaan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran
MKB-DAL.02.02.04.03	Layanan Pelaporan Keuangan dan Akuntansi	Bidang Akuntansi		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran
MKB-DAL.02.02.04.04	Layanan Pengelolaan Gaji PNSD	BPKAD (Bidang Perbendaharaan)		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		
MKB-DAL.02.02.04.05	Layanan Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, BTT dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang Perbendaharaan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran
MKB-DAL.02.02.04.06	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		
MKB-DAL.02.09.02.01	Layanan Pendaftaran Domain	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.02	Layanan Pelaksanaan dan Pengawasan Domain	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.09.02.03	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.04	Layanan e-Government	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.05	Layanan kebijakan SPBE	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
MKB-DAL.02.09.02.06	Layanan GCIO	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.07	Layanan Monev dan Pelaporan SPBE	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.09.02.08	Layanan Sistem Keamanan Informasi	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.09	Layanan Data dan Informasi Elektronik	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.10	Layanan Aplikasi Perangkat Daerah	Bidang Aptika		Adpem & Publik	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
MKB-DAL.02.09.02.1 1	Layanan Command Center	Bidang Aptika		Adpem & Publik	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.1 2	Layanan Server Perangkat Daerah	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.09.02.1 3	Layanan Perangkat Jaringan dan Komunikasi	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.1 4	Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.1 5	Layanan Smart City	Bidang Aptika		Adpem & Publik	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
MKB-DAL.02.09.02.1 6	Layanan Wifi Gratis di tempat publik	Bidang Aptika		Publik	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.1 7	Kegiatan Vulnerability Assessment dan Penetration Testing (VAPT)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.09.02.18	Kegiatan Security Awarness	Bidang Persandian		Adpem dan Publik	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.19	Kegiatan Monitoring Security Operation Center (SOC)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.20	Pengelolaan CSIRT	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
MKB-DAL.02.09.02.2 1	Pengelolaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.2 2	Pengelolaan aplikasi Sistem Penghubung Layanan (SPL) untuk Tanda	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Tangan Elektronik								
MKB-DAL.02.09.02.2 3	Pengelolaan aplikasi Dashboard Security Assesment (DSA)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.2 4	penyusunan tata kelola di bidang persandian dan keamanan informasi	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.09.02.2 5	Pelaksanaan Uji Kesesuaian Sistem (UKS)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.2 6	Pemenuhan dan Pengisian mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.09.02.2 7	Layanan e-Mail melalui aplikasi Sanapati	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.2 8	Layanan Statistik email melalui website pemkot	Bidang Persandian			Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.2 9	Layanan Publikasi iData	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
MKB-DAL.02.09.02.30	Layanan Pengembangan Infrastruktur	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.31	Layanan Membangun Metadata	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.09.02.3 2	Layanan Peningkatan Kelembagaan	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.3 3	Layanan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
MKB-DAL.02.09.02.3 4	Layanan Penyelenggaraan Otorisasi	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	MKB-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
MKB-DAL.02.04.09.1 1	Layanan terkait verifikasi LHKASN dan penilaian Reformasi Birokrasi	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.02.04.09.1 2	Layanan terkait MCP KPK dan Pengendalian Gratifikasi	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.02.04.09.1 3	Layanan terkait Survei Penilaian Integritas	Sub Bagian Perencanaan		Adpem	Elektronik	MKB-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
MKB-DAL.01.40.06.0 1	Layanan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kabupaten(Per	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Jenis Bencana)								
MKB-DAL.01.40.06.02	Layanan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Setiap Desa/Kelurahan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
MKB-DAL.01.40.06.03	Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.06.04	Layanan Bantuan Stimulan Bagi Korban Bencana dan Penyusun Dokumen JITUPASNA	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
MKB-DAL.01.40.06.05	Layanan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.06.06	Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik		Adpem	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
MKB-DAL.01.40.06.07	Layanan Pengelolaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik		Adpem	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.06.08	Layanan Pelatihan Pemuda Siaga Bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Adpem	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
MKB-DAL.01.40.06.09	Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
MKB-DAL.01.40.06.10	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan Non Kebakaran								
MKB-DAL.01.40.06.1 1	Layanan Diklat Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
MKB-DAL.01.40.06.1 2	Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.40.06.13	Layanan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
MKB-DAL.01.40.06.14	Layanan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	MKB-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
MKB-DAL.01.32.04.01	Penyusunan Rencana Tenaga	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kerja Makro (RTK)					Pertumbuhan Ekonomi			Kualitas Tenaga Kerja
MKB-DAL.01.32.04.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK)	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
MKB-DAL.01.32.04.03	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Tenaga Kerja
MKB-DAL.01.32.04.04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
MKB-DAL.01.32.04.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kabupaten	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.32.04.0 6	Pelayanan antar Kerja	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja
MKB-DAL.01.32.04.0 7	Penyelengg araan Unit Layanan Disabilitas Ketenagaker jaan	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB- DAL.01.32.04.0 8	Perluasan Kesempatan Kerja	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja
MKB- DAL.01.32.04.0 9	Job Fair/Burs aKerja	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.32.04.10	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
MKB-DAL.01.32.04.11	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Pekerja Migran					Pertumbuhan Ekonomi			Kualitas Tenaga Kerja
MKB-DAL.01.32.04.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kabupaten	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.32.04.13	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kabupaten/ Kabupaten								
MKB- DAL.01.32.04.1 4	"Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah Kabupaten/ Kabupaten"								
MKB- DAL.01.32.04.1 5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah Kabupaten/ Kabupaten								
MKB- DAL.01.32.04.1 6	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah Kabupaten/ Kabupaten								
MKB- DAL.01.32.04.1 7	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah Kabupaten/ Kabupaten								
MKB- DAL.01.32.04.1 8	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kabupaten	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	MKB-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja
MKB- DAL.01.13.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha	Bidang Pengawasan Koperasi		Publik	Elektron ik	MKB-05.1 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah					Pertumbuhan Ekonomi			Dan Usaha Mikro

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kabupaten								
MKB-DAL.01.13.01.02	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Bidang Pengawasan Koperasi		Publik	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kabupaten								
MKB-DAL.01.12.03.01	Pelayanan Penyusunan Kebijakan Daerah mengenai	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Fasilitasi / Insentif Penanaman Modal								Usaha Penanam an Modal
MKB- DAL.01.12.03.0 2	Pelayanan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Ins entif Kemudahan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektron ik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan Sektor Usaha Penanam an Modal
MKB- DAL.01.12.03.0 3	Pelayanan Penyusunan Rencana Umum	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektron ik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Penanaman Modal								Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.04	Pelayanan Data Peta Potensi	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.05	Pelayanan Data Peluang Usaha	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kabupaten Kabupaten								Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.06	Pelayanan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.07	Pelayanan Kegiatan Promosi	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Penanaman Modal								Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.08	Pelayanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.09	Pelayanan Pengelolaan dan Pengemban	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	gan Sistem Perizinan & Non Perizinan, dan Penanaman Modal								Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.10	Pelayanan Pembinaan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal, Penbinaan Pengajuan Perizinan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan Non Perizinan								
MKB-DAL.01.12.03.1 1	Pelayanan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.1 2	Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Penanaman Modal								Penanam an Modal
MKB- DAL.01.12.03.1 3	Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Kementrian Investasi/BKPM) - OSS	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan Sektor Usaha Penanam an Modal
MKB- DAL.01.12.03.1 4	Layanan Perizinan (Milik Daerah) - SITETEH	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan Sektor Usaha

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.1 5	Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung - SIMBG	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.1 6	Pelayanan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	sebagai bagian dari proses perizinan melalui sistem pusat (kementrian investasi/BKPM)								Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.17	Pelayanan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	sebagai bagian dari proses perizinan melalui sistem daerah								Penanaman Modal
MKB-DAL.01.12.03.18	Layanan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.12.03.1 9	Pelayanan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
MKB-DAL.01.05.03.0 1	Layanan terkait Pengembangan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.05.03.0 2	Layanan terkait Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Kelompok Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		Publik, Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
MKB-DAL.01.05.03.0 3	Layanan terkait Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Kelompok Substansi Regulasi dan		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		Penyuluhan Pajak Daerah							
MKB-DAL.01.05.03.04	Layanan terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
MKB-DAL.01.05.03.05	Layanan terkait Pendataan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Kelompok Sub Substansi		Adpem/khusus hanya Cek PBB online (Publik)	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		Pendataan Pajak Daerah							
MKB-DAL.01.05.03.06	Layanan terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
MKB-DAL.01.05.03.07	Layanan terkait Penetapan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.05.03.08	Layanan terkait Pelayanan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
MKB-DAL.01.05.03.09	Layanan terkait Pemeriksaan Pajak Daerah	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Kelompok Sub Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
MKB-DAL.01.05.03.10	Layanan terkait Penagihan dan Penyelesaian	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Sub Bidang Penagihan dan Penyelesaian		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	n Piutang Pajak Daerah	Piutang Pajak Daerah							
MKB-DAL.01.05.03.1 1	Layanan terkait Pemeriksaan Pajak Daerah	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Kelompok Sub Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
MKB-DAL.01.05.03.1 2	Layanan terkait Pengembangan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	MKB-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.19.01.01	Pengujian Kendaraan bermotor	DISHUB (UPTD PKB)		Publik	Elektronik	MKB-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.01 Kemanan an Dan Keselamat an Transport asi
MKB-DAL.01.19.01.02	TILANG	DISHUB (Bidang Lalulintas)		Publik	Elektronik	MKB-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.01 Kemanan an Dan Keselamat an Transport asi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
MKB-DAL.01.19.01.03	Pengawasan lalu lintas jalan	DISHUB (Bidang Lalu lintas)		Adpem	Elektronik	MKB-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.01 Kemanan an Dan Keselamat an Transportasi

Bab 5 Arsitektur Aplikasi

5.1. Struktur dan Referensi Arsitektur Aplikasi

Berdasarkan dokumen Rencana Perpres Arsitektur SPBE Nasional, domain arsitektur aplikasi SPBE diklasifikasikan kedalam tingkatan struktur domain arsitektur menjadi 4 (empat) tingkat



Berdasarkan gambar 5.1.1, dapat dilihat bahwa arsitektur aplikasi Kabupaten Mimika ada pada tingkat 3 dan tingkat 4 dengan mengacu pada SPBE Nasional di tingkat 1 dan tingkat 2 yang akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional.

5.1.1. Prinsip Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur aplikasi menerjemahkan serangkaian proses bisnis dalam suatu layanan yang didukung oleh aplikasi. Di Kabupaten Mimika, aplikasi yang dibangun hendaknya memperhatikan prinsip keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi dan optimasi layanan. Selain itu, penyusunan arsitektur aplikasi disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan layanan. Dalam hal penyusunan arsitektur aplikasi juga harus memperhatikan standarisasi aplikasi yang terdiri dari teknologi yang digunakan, lisensi, kode sumber terbuka dan delivery/prosesnya.

Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

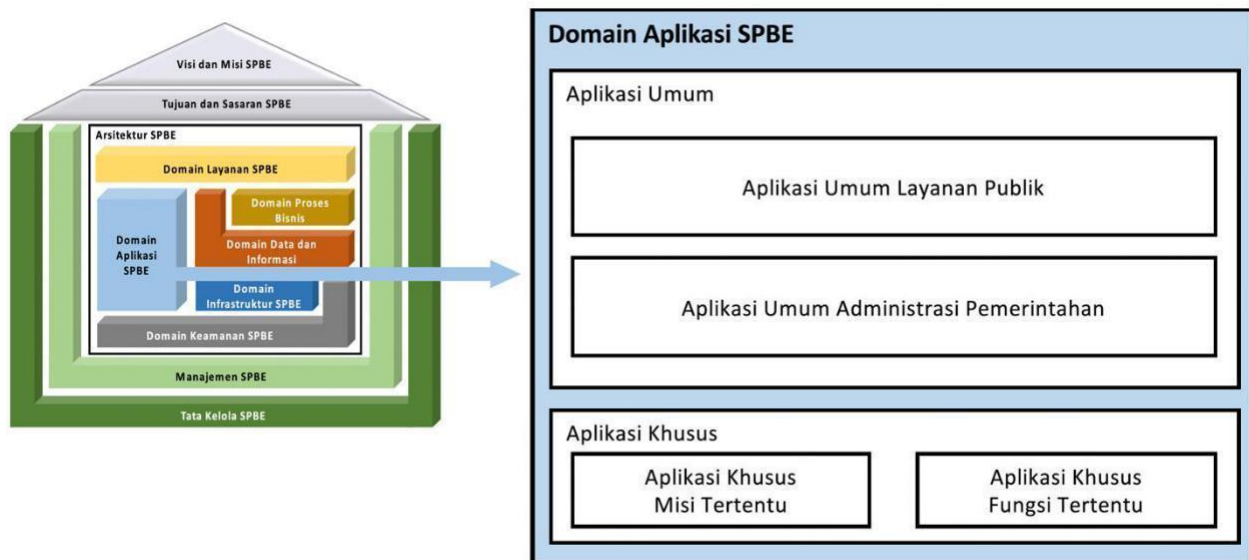
1. pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan);

2. tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan regulasi;
3. lainnya serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan); dan standarisasi (teknologi, lisensi, kode sumber terbuka, delivery/proses).

Kerangka kerja arsitektur Aplikasi SPBE terdiri atas referensi arsitektur Aplikasi SPBE dan domain arsitektur Aplikasi SPBE.

5.1.2. Referensi Aplikasi Tingkat Nasional

Domain data dan informasi juga mengacu pada referensi aplikasi (RA) tingkat nasional. Domain arsitektur aplikasi SPBE memiliki beberapa komponen di dalamnya. Pembagian komponen dalam referensi aplikasi SPBE dapat dilihat pada Gambar 5.1.2.

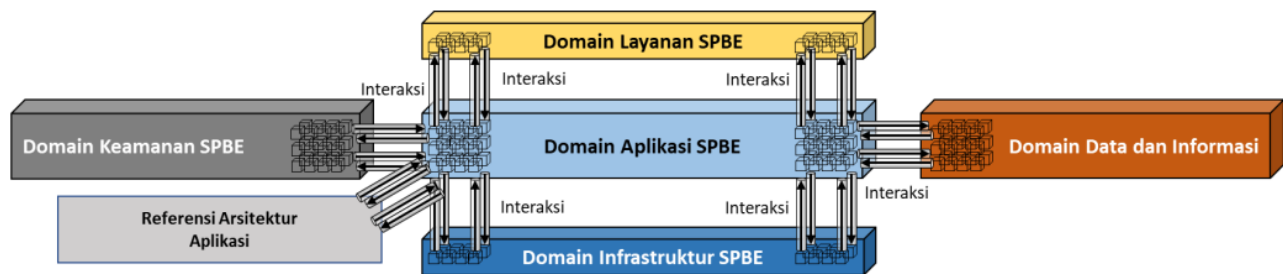


Secara umum aplikasi pada arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi dua bagian yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Aplikasi umum memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi umum layanan publik dan aplikasi umum administrasi pemerintahan. Sedangkan aplikasi khusus juga memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi khusus misi tertentu dan fungsi tertentu.

5.2. Keteraitan Antar Domain

Dapat dilihat bahwa Tujuan dan Sasaran SPBE harus memenuhi Referensi SPBE Nasional dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dan Sasaran SPBE selanjutnya diturunkan menjadi Arah dan Kebijakan SPBE yang direalisasikan dalam bentuk arsitektur SPBE.



Gambar 5.1.3 Keterkaitan Antar Domain Aplikasi

Pada Arsitektur SPBE terdapat enam domain yang disusun, salah satunya adalah arsitektur Aplikasi SPBE. Keluaran dari Arsitektur Aplikasi SPBE salah satunya adalah rincian data aplikasi, proses/fungsi dari aplikasi dan komponen umum aplikasi. Keluaran ini merupakan bagian dari daftar aplikasi umum yang di dalamnya juga terdapat perbaikan detail layanan. Daftar aplikasi ini sebaiknya disajikan dalam bentuk peta jalan untuk periode tertentu sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengembangan aplikasi yang akan dijalankan. Selain itu daftar aplikasi juga harus diselaraskan dengan kondisi yang diharapkan oleh pengguna sehingga dapat mendukung Inisiatif Strategi SPBE dan secara tidak langsung menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran SPBE.

5.2.1. Aplikasi Kabupaten Mimika

Sesuai dengan Peraturan Kabupaten Mimika mengenai proses bisnis yang ada di Kabupaten Mimika dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu Proses Utama, Proses Bisnis Pendukung dan Proses Bisnis Manajerial. Pada bagian ini akan digambarkan pemetaan aplikasi yang digunakan di lingkungan Kabupaten Mimika terhadap proses bisnis utama dan pendukung. Pemetaan ini didasarkan pada dokumen Peraturan MKB tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5.2.2. Identifikasi Kebutuhan Aplikasi

Identifikasi kebutuhan Aplikasi SPBE berdasarkan layanan yang ada di pemerintahan yang pelaksanaannya direalisasikan ke dalam tahapan peta jalan dan terkait dengan kapabilitasnya. Kebutuhan Aplikasi yang ada di Kabupaten Mimika perlu diidentifikasi berdasarkan layanan yang ada. Layanan aplikasi pemerintah di lingkungan Kabupaten Mimika telah diterapkan di beberapa proses utama dan pendukungnya, namun untuk menentukan kapabilitas kebutuhan aplikasi yang

akan datang, perlu diidentifikasi secara rinci dengan melakukan pemetaan terhadap atribut Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE.

5.2.3. Metadata Arsitektur Aplikasi

Sesuai dengan yang tercantum pada rencana Peraturan Presiden tentang SPBE, maka aplikasi yang ada di lingkungan Kabupaten Mimika harus memiliki Metadata Aplikasi dengan atribut yang telah ditentukan. Metadata untuk Aplikasi dapat dilihat pada tabel 5-1

Tabel 3.6 Metadata Aplikasi

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
MKB-DAA.02.01.01	Website resmi Kabupaten Mimika	Website resmi dari Kabupaten Mimika yang berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Kabupaten Mimika
MKB-DAA.02.01.02	Website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	CMS Wordpress	MySQL		Sekretariat Kabupaten Mimika
MKB-DAA.02.01.03	Website resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Sekretariat DPRD

		Kabupaten Mimika						
MKB-DAA.02.01.04	Website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Inspektorat Daerah
MKB-DAA.02.01.05	Website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Native	MySQL		Dinas Pendidikan
MKB-DAA.02.01.06	Website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Kesehatan
MKB-DAA.02.01.07	Website resmi Dinas	Website resmi berisikan	Proprietary	PHP	Native	MySQL		Dinas Sosial

	Sosial Kabupaten Mimika	semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mimika						
MKB-DAA.02.01.08	Website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Native	MySQL		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MKB-DAA.02.01.09	Website resmi Dinas Ketahanan Pangan	Website resmi berisikan semua informasi dan	Proprietary	PHP	Native	MySQL		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

	dan Pertanian Kabupaten Mimika	berita kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mimika						
MKB- DAA.02.01.10	Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Lingkungan Hidup
MKB- DAA.02.01.11	Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Komunikasi dan Informatika

MKB-DAA.02.01.12	Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MKB-DAA.02.01.13	Website resmi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL	Dinas Pemuda Dan Olahraga
MKB-DAA.02.01.14	Website resmi Dinas Pariwisata dan	Website resmi berisikan semua informasi dan	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika

	Kebudayaan Kabupaten Mimika	berita kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika						
MKB-DAA.02.01.15	Website resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
MKB-DAA.02.01.16	Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Satuan Polisi Pamong Praja

		Mimika						
MKB-DAA.02.01.17	Website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MKB-DAA.02.01.18	Website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Arsip dan Perpustakaan
MKB-DAA.02.01.19	Website resmi Dinas	Mimika Website resmi berisikan	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Tenaga Kerja

	Tenaga Kerja Kabupaten Mimika	semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika						
MKB- DAA.02.01.20	Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigni ter	MySQL		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
MKB- DAA.02.01.21	Website resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian	Proprietary	PHP	Codeigni ter	MySQL		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Kabupaten Mimika	Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika						
MKB-DAA.02.01.22	Website resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Perhubungan
MKB-DAA.02.01.23	Website resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

		Perindustrian Kabupaten Mimika						
MKB- DAA.02.01.24	Website resmi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigni ter	MySQL		Dinas Perumahan dan Pemukiman
MKB- DAA.02.01.25	Website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigni ter	MySQL		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
MKB- DAA.02.01.26	Website resmi Badan Kepegawaian dan	Website resmi berisikan semua informasi dan	Proprietary	PHP	Codeigni ter	MySQL		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

	Pengembangan Sumber Daya Manusia	berita kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						Manusia
MKB- DAA.02.01.27	Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah	Proprietary	PHP	Codeigni ter	MySQL		Badan Keuangan dan Aset Daerah
MKB- DAA.02.01.28	Website resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigni ter	MySQL		Badan Pendapatan Daerah

MKB-DAA.02.01.29	Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MKB-DAA.02.01.30	Website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MKB-DAA.02.01.31	Website resmi RSUD Kabupaten Mimika	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		RSUD Kabupaten Mimika

		di RSUD Kabupaten Mimika						
MKB-DAA.01.01.01	E-PROFIL	Aplikasi memuat Profil Kesehatan secara Umum Daerah Kabupaten Mimika	Open Source	PHP	Laravel	MySQL		Dinas Kesehatan
MKB-DAA.01.01.02	PIKOBAR	Aplikasi Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat	Open Source	PHP, Dart		MySQL, Firebase		Dinas Komunikasi dan Informatika
MKB-DAA.01.01.03	SAPA WARGA	Aplikasi Layanan Publik Sapawarga bantu warga salurkan aspirasi, dapatkan informasi penting, dan akses layanan publik secara	Open Source	PHP, Dart		MySQL, Firebase		Dinas Komunikasi dan Informatika

		digital						
MKB-DAA.02.01.32	PSC-119	Pusat komunikasi dan tim reaksi cepat pertolongan pertama pada kasus krisis kesehatan akibat bencana, kecelakaan kerja dan kebakaran dan kecelakaan lalu lintas)	Proprietary	PHP		MySQL		Dinas Kesehatan
MKB-DAA.01.01.04	SIMPATIK JABAR	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Untuk Publik merupakan sistem perizinan online Dinas PMPTSP JAWA BARAT yang telah direplikasi di	Open Source	PHP, Dart		MySQL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika

		18 provinsi Indonesia.						
		SIMPATIK memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan izin secara online, mengetahui berbagai informasi mengenai perizinan dan persyaratannya, mentracing status perizinannya, melakukan cetak mandiri dokumen perizinan, dan lain-lain						
MKB-DAA.01.01.05	IPJ JDS	Integrated Portal Jabar atau Website Portal	Open Source					Dinas Komunikasi dan Informatika

		Jabar merupakan website satu pintu pengelolaan informasi seputar pelayanan pemerintahan, berita terkini, dan sebagainya yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia terutama warga Jawa Barat dengan tujuan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam memberikan informasi.						
MKB-DAA.02.01.33	SATU DATA Kesehatan	Aplikasi Portal Satu Data Kesehatan mengintegrasikan	Open Source					Dinas Kesehatan

		berbagai data informasi yang akurat						
MKB-DAA.01.01.06	PPDB	Aplikasi berbasis website yang mendukung pelayanan penerimaan Peserta Didik Baru	Proprietary					Dinas Pendidikan
MKB-DAA.02.01.34	Aplikasi Pengajuan/Perbaikan Fasilitas Sekolah	Aplikasi untuk mengajukan perbaikan atau pengadaan sekolah-sekolah	Proprietary					Dinas Pendidikan
MKB-DAA.02.01.35	OMSPAN	Aplikasi berbasis web yang dinamakan Aplikasi Online Monitoring	Open Source					Dinas Pendidikan

		Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.						
MKB- DAA.01.02.01	DAPODIK	Aplikasi Dapodik berfungsi untuk menghimpun data terkait sarana prasarana sekolah, siswa, guru dan tendik. Dapodik juga menjadi dasar pemberian segala jenis tunjangan, seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus dan bentuk lainnya seperti dana BOS.	Open Source					Dinas Pendidikan

MKB-DAA.02.01.36	SIMDIK	Aplikasi yang bertujuan untuk melakukan proses manajerial dan pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan. Termasuk didalamnya pengolahan Data Pokok Pendidikan, Seleksi	Proprietary					Dinas Pendidikan
		Calon Kepala Sekolah, RKAS Online, dan sebagainya.						
MKB-DAA.02.01.37	SIDAKEP	Aplikasi Sistem Pendataan Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan	Proprietary					Dinas Pendidikan

		di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat						
MKB-DAA.02.01.39	OPAC	Aplikasi yang dikembangkan oleh Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Aplikasi ini digunakan oleh guru SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat untuk mengusulkan kenaikan pangkat jabatan dengan	Proprietary					Dinas Pendidikan

		menginputkan data pendidikan, data penugasan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan data penunjang.						
MKB-DAA.01.02.02	KRISNA	Aplikasi KRISNA adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian,	Open Source					Dinas Pendidikan
		yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian						

		Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.						
MKB- DAA.02.01.40	OSS	Aplikasi yang mengurus tentang sistem pelayanan perizinan secara terintegrasi	Proprietary					Dinas Pendidikan
MKB- DAA.01.01.07	CANDIL	Aplikasi yang memuat buku-buku digital dan literasi digital yang dapat diakses oleh siswa atau	Open Source					Dinas Pendidikan

		masyarakat						
MKB-DAA.02.01.41	BOPD	Aplikasi yang mengelola Biaya Operasional Pendidikan	Proprietary					Dinas Pendidikan
MKB-DAA.02.01.42	MONEV SCORECARD	Aplikasi monitoring dan evalauasi penilaian kinerja	Proprietary					Dinas Pendidikan
MKB-DAA.02.01.43	Temen Jabar	Aplikasi Publik yang akan rilis, dikembangkan sebagai media Informasi Data Jalan dan Jembatan, serta Aset	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MKB-DAA.02.01.44	Tali Kuat	Aplikasi Internal untuk kendali mutu dan kinerja	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MKB-DAA.01.01.08	SIPJAKI	Aplikasi dari Kementrian PU, untuk mengelolala Jasa	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Konstruksi						
MKB-DAA.02.01.45	Aplikasi Konsultasi Publik	Aplikasi untuk menerima keluhan publik terkait masalah pembangunan	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MKB-DAA.02.01.46	e-Musrenbang	Aplikasi online untuk melakukan musyawaran rencana Pembangunan	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MKB-DAA.02.01.47	Aplikasi Barata	Aplikasi berbasis website yang menampilkan jumlah kejadian bencana yang terjadi di sekitar Jawa Barat	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MKB-DAA.01.01.09	PUSDATIN	Aplikasi berbasis website yang menampilkan	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		jumlah kejadian bencana yang terjadi di sekitar Kabupaten Mimika						
MKB-DAA.01.01.10	Peta Rawan Bencana	Aplikasi yang menampilkan daerah - daerah rawan bencana berupa peta	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MKB-DAA.02.01.48	e-Cegah SIAGA	Aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai elearning dalam menghadapi bencana	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MKB-DAA.02.01.49	DMS (Disaster Management System)	Aplikasi yang digunakan untuk mengatur dalam keadaan bencana	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MKB-DAA.01.01.11	Infrastruktur Permukiman	Aplikasi yang berisi sistem informasi Pengelolaan Air Minum, Drainase, Persampahan,	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
		dan Air Limbah Lintas Kab/Kabupaten.						
MKB-DAA.02.01.50	SiMona	Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan SPAM Regional.	Proprietary					Dinas Perumahan dan Pemukiman
MKB-DAA.01.02.03	Greeny	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola persampahan regional.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman

MKB-DAA.01.01.12	Apartemen Transit	Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait Apartemen Transit dan registrasi Apartemen Transit.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
MKB-DAA.01.01.13	Klinik Rumah	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana konsultasi perbaikan rumah.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
MKB-DAA.02.01.51	SIKEBAL	Aplikasi yang digunakan dalam perencanaan dan perawatan Rusun.	Proprietary					Dinas Perumahan dan Pemukiman
MKB-DAA.01.01.14	SIFAT (Sistem Informasi	Aplikasi yang digunakan sebagai sistem	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman

	Pengelolaan Apartemen Transit)	informasi pengaduan, sistem informasi pemberdayaan, pengelolaan Ex-Penghuni, sistem informasi gerakan menabung apartemen transit, dan kepenghunian Apartemen Transit.						
MKB-DAA.01.01.15	SIAP JUARA	Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan penghuni Apartemen Transit.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
MKB-DAA.01.01.16	SIMANTAN (Sistem Informasi	Aplikasi yang berfungsi untuk menampung	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman

	Pertanahan)	informasi terkait pertanahan.						
MKB- DAA.01.01.17	Open MAP	Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan peta kolaborasi.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
MKB- DAA.01.01.18	Aplikasi Terminal	Aplikasi yang berisi informasi lokasi terminal, jadwal keberangkatan bus, dan jumlah penumpang bus.	Open Source					Dinas Perhubungan
MKB- DAA.01.02.04	SEMUT JABAR	Aplikasi track kendaraan yang telah di pasangkan GPS dimana dapat	Open Source					Dinas Perhubungan

		mengetahui lokasi dan posisi kendaraan tersebut.						
MKB-DAA.02.01.52	SILAJA	Aplikasi yang digunakan untuk monitoring kondisi trafik lalu lintas jalanan di Provinsi Jawa Barat.	Proprietary					Dinas Perhubungan
MKB-DAA.02.01.53	SPION JABAR	Aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perizinan penyelenggaraan angkutan umum.	Proprietary					Dinas Perhubungan
MKB-DAA.01.01.19	Sistem Informasi Perlengkapan Jalan	Aplikasi yang membantu dalam penyelenggaraan	Open Source					Dinas Perhubungan

		perlengkapan jalan.						
MKB-DAA.01.01.20	LAPOR!	Aplikasi LAPOR! Adalah sarana aspirasi dan pengaduan yang mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu.	Open Source					Dinas Perhubungan
MKB-DAA.02.01.54	SICAPLANG	Aplikasi untuk memudahkan pelacakan dan pencatatan bukti pelanggaran, yang bisa digunakan Satpol PP dan juga bisa diketahui	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja

		masyarakat.						
MKB-DAA.02.01.55	SILATIN	Aplikasi yang berisi seluruh tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja
MKB-DAA.02.01.56	SILANGGAR	Aplikasi pengaduan	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja
MKB-DAA.02.01.57	PUSDALOPS	Aplikasi yang membantu Satpol PP dalam bertugas membantu penanggulangan bencana	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja
MKB-DAA.02.01.58	IKP (PROKES COVID	Aplikasi yang membantu Satpol PP dalam bertugas menerapkan prokes COVID-19	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja

MKB-DAA.02.01.59	Simbakesbangpol	Website pengelolaan data Bidang Kesbangpol. Penyajian data yang ada di dalam Website merupakan hasil input	Proprietary					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Daerah Kesbangpol Kabupaten/Kabupaten Jawa Barat.						
MKB-DAA.01.01.21	Open Data Jabar	Aplikasi yang menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat.	Open Source					Dinas Komunikasi dan Informatika

MKB-DAA.02.01.60	SIKONDA	Website yang menyediakan laporan mengenai kegiatan /kejadian terkait kesatuan bangsa dan politik.	Proprietary					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MKB-DAA.01.01.22	DPMPTSP	Website kawasan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Open Source					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MKB-DAA.01.01.23	SIMPPSDB	Aplikasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan	Open Source					Dinas Sosial

		uang/barang						
MKB-DAA.02.01.61	SIMOJANG	Aplikasi yang memberikan informasi dalam program pemberian bantuan akses listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Jawa Barat.	Proprietary					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
MKB-DAA.02.01.62	DTKS	Aplikasi yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta	Proprietary					Dinas Sosial

		Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.						
MKB-DAA.02.01.63	SIDATUK	Aplikasi yang berfungsi untuk memfasilitasi pemadaan, penyandingan, pencocokan, dan pencarian data kependudukan pada data warehouse kependudukan se-Kabupaten Mimika.	Proprietary					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MKB-DAA.02.01.64	ALBAS	Aplikasi pelaporan bencana alam dan sosial. Albas menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana alam maupun sosial agar dapat ditangani secepatnya. Selain itu, Albas juga menyertakan update terbaru seputar bencana yang terjadi, penerimaan dan penyaluran bantuan dari masyarakat.	Proprietary					Dinas Sosial
MKB-DAA.02.01.65	Aplikasi Stock Barang	Aplikasi yang digunakan untuk mendata stok barang bagi korban bencana alam di Provinsi Jawa Barat	Proprietary					Dinas Sosial

MKB-DAA.02.01.66	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Aplikasi yang membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jawa Barat	Proprietary					Dinas Sosial
MKB-DAA.02.01.67	Aplikasi Sistem Informasi Pengangkatan Anak	Aplikasi yang ditujukan untuk membantu proses adopsi/pengangkatan anak	Proprietary					Dinas Sosial

Bab 6 Arsitektur Infrastruktur

6.1. Struktur dan Referensi Arsitektur Infrastruktur

Sebagai acuan baru dalam pengelolaan arsitektur SPBE, pemerintah menetapkan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional mengatur arah kebijakan dan strategi yang harus diikuti dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berikut adalah poin-poin penting yang diatur oleh perpres tersebut:

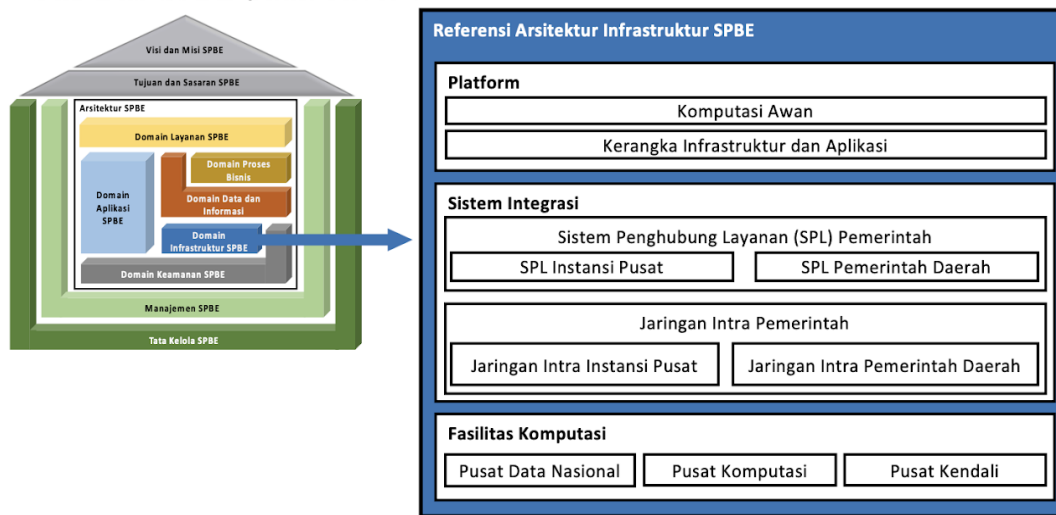
- Integrasi proses bisnis, data, dan informasi: Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data, dan informasi, beserta infrastruktur yang terkait.
- Pembangunan sistem keamanan: Arsitektur keamanan memiliki peranan kunci dalam Arsitektur SPBE Nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap data dan informasi yang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

6.1.1. Prinsip Arsitektur Infrastruktur

Sesuai dengan Perpres No. 132 Tahun 2022 maka prinsip pengembangan arsitektur infrastruktur SPBE :

- Arsitektur harus selaras dengan rencana induk dan peraturan SPBE nasional, memastikan kesesuaian antara infrastruktur SPBE dan tujuan strategis secara keseluruhan
- Fleksibilitas dalam arsitektur untuk mengakomodasi perubahan dan kemajuan teknologi di masa depan
- Pengembangan infrastruktur SPBE harus memprioritaskan kebutuhan spesifik masing-masing lembaga dan memastikan penyelesaian proyek tepat waktu
- Pemetaan kondisi keamanan yang komprehensif selama implementasi SPBE diperlukan untuk infrastruktur yang aman dan terjamin.
- Selain hal tersebut arsitektur infrastruktur harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal berikut:
 1. Arsitektur infrastruktur harus mendukung tugas fungsi dan wewenang organisasi.
 2. Kabupaten Mimika berkaitan dengan beberapa lembaga lain (ESDM, dll.) dan pihak lain
 3. Terkoneksi dan berinteraksi ke Pusat data Nasional

Arsitektur infrastruktur Kabupaten Mimika menggambarkan infrastruktur yang terkait dengan tugas dan wewenang Kabupaten Mimika dengan acuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020. Arsitektur infratraktur juga disusun dengan mengacu pada rancangan Peraturan Presiden tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional seperti ditunjukkan pada Gambar berikut:



Sumber: Perpres 132 Th 2022 tentang Arsitektur SPBE

Gambar 6.1.1 Struktur Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional

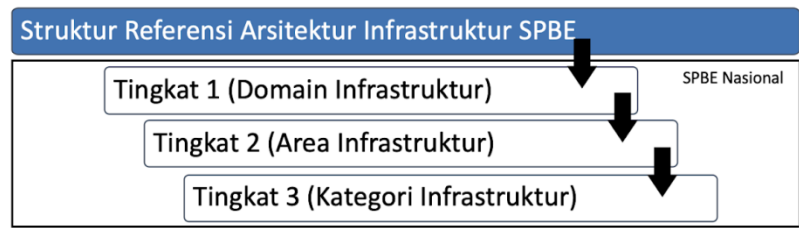
Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

6.1.2. Referensi Infrastruktur Tingkat Nasional

Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

1. Harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru ;
2. Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur spbe;
3. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
4. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
5. Berbasis standar umum (*open standard*); dan

6. Dapat digunakan untuk mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan spbe, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain infrastruktur SPBE pada gambar berikut:



Gambar 6.1.2 Struktur Referensi Arsitektur SPBE

Rincian arsitektur infrastruktur yang dijadikan referensi dalam dokumen ini antara lain dijelaskan sebagai berikut :

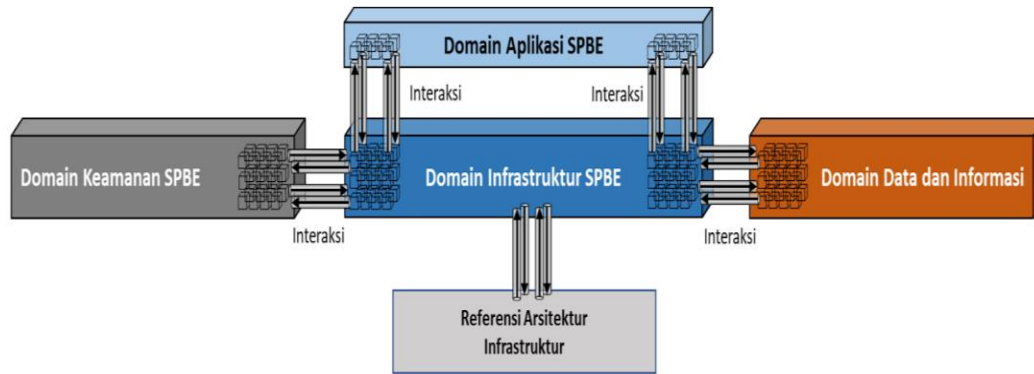
Tabel 6 - 1 Penjelasan Arsitektur Infrastruktur SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitas Komputasi		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
0.102	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
0.103	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
0.201	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi.
0.202	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
0.301	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung anlikasi.
0.302	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

Sumber: Perpres 132 Tahun 2022 tentang SPBE

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada gambar berikut:



Gambar 6.1.3 Relasi langsung pada domain infrastruktur Arsitektur SPBE

6.2. Referensi Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Mimika

Dengan mengacu pada referensi arsitektur infrastruktur tersebut, maka pembahasan pada bagian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Topologi jaringan sebagai koneksi penghubung antar direktorat dan hubungan dengan lembaga atau organisasi lain sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kabupaten Mimika
2. Server sebagai fasilitas transaksi serta penyimpanan data dan informasi. Server ini meliputi server lokal dan server di Pusat Data Nasional.
3. Kebutuhan *bandwidth* sebagai kapasitas transaksi dalam jaringan untuk mendukung layanan yang diberikan Kabupaten Mimika
4. Kebutuhan perangkat keras setiap paengguna sebagai media berinteraksi menggunakan koneksi dalam jaringan.
5. Harus mempertimbangkan referensi manajemen keamanan informasi berikut:

• • • • • REFERENSI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI • • • • •

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 40 s.d. 41)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- ISO 27001

6.2.1. Metadata Arsitektur Infrastruktur

Sesuai dengan yang tercantum pada rencana Peraturan Presiden tentang SPBE, maka infrastruktur yang ada di lingkungan Kabupaten Mimika harus memiliki Metadata Infrastruktur dengan atribut yang telah ditentukan. Metadata untuk infrastruktur dapat dilihat pada tabel 6-2 :

Tabel 5.2. Pemetaan Infrastruktur Aplikasi, Layanan Utama dan Proses Bisnis pada Pemerintah Kabupaten Mimika

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
BKT-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Mimika yang sehat dan	BKT-DAB.01.01 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Layanan Data dan Informasi Elektronik	SATU DATA Kesehatan	Web Based
		BKT-DAL.01.25.02.17 Layanan Sistem informasi pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium Covid-19, update kesembuhan dan kematian kasus Covid-19	IKP (PROKES COVID	Web Based
	BKT-DAB.01.02 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	BKT-DAL.01.25.02.05 Layanan Informasi Kesehatan Daerah	E-PROFIL	Web Based
		BKT-DAL.01.25.02.17 Pencatatan data Covid-19 Layanan Publikasi Data	PIKOBAR	Web Based

		BKT-DAL.01.25.02.12 Layanan Kegawat daruratan Kesehatan Masyarakat	PSC-119	Web Based
	BKT-DAB.01.03 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	BKT-DAD.14.08 Data Drainase yang tertangani, BKT-DAD.14.06 Data Kegiatan Persampahan	Infrastruktur Permukiman	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
	BKT-DAB.01.04 Mengendalikan Sumber-Sumber Pencemar dan kerusakan lingkungan	BKT-DAD.14.06 Data Kegiatan Persampahan	Greeny	Web Based
BKT-DAB.02 Mewujudkan Masyarakat Pemerintah Kabupaten	BKT-DAB.02.01 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu	BKT-DAL.01.31.03.02 Layanan Informasi PPDB Online jenjang SD	PPDB	Web Based

Mimika yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)	Pendidikan Formal dan Non Formal	BKT-DAL.01.31.05.01 Layanan Informasi PPDB Online jenjang SMP		
		BKT-DAL.01.31.03.01 Layanan Informasi BOS SD BKT-DAL.01.31.03.11 Layanan Informasi BOS SMP BKT-DAL.01.31.03.03 Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SD BKT-DAL.01.31.05.02 Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SMP	DAPODIK	Web Based
		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	SIMDIK	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi

		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	SIDAKEP	Web Based
		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan BKT-DAL.01.31.01.01 Layanan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB)	OPAC	Web Based
		BKT-DAL.01.31.04.10 Layanan Informasi Kurikulum Mulok jenjang Pendidikan Dasar	CANDIL	Web Based
		BKT-DAL.01.31.04.01 Layanan Informasi BOP Pendidikan Kesenjangan	BOPD	Web Based
BKT-DAB.03 Mewujudkan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Mimika yang Cerdas dan Melavani	BKT-DAB.03.01 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Layanan e-Government	SAPA WARGA	Web Based
		BKT-DAL Pelayanan Pengelolaan dan	SIMPATIK JABAR	Web Based

(Smart Government)		Pengembangan Sistem Perizinan & Non Perizinan, dan Penanaman Modal		
		Layanan Data dan Informasi Elektronik	IPJ JDS	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.31.02.06 Layanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	OSS	Web Based
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SiMona	Web Based
		BKT-DAL.01.40.04.17 Pelayanan Pengaduan Masyarakat	LAPOR!	Web Based
		Layanan Pengaduan Ormas	DPMPTSP	Web Based

	BKT-DAB.03.02 Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)	BKT-DAL.01.20.01.02 Pendataan Aset Bangunan (sudah dibangun, butuh rehab dan intervensi pemerintah, Jumlah Bangunan di Mimika BKT-DAL.01.20.02.03 Layanan Retribusi Rusunawa BKT-DAL.01.20.02.04 Layanan Aduan Penghuni Rusunawa	Klinik Rumah SIKEBAL SIFAT (Sistem Informasi Pengelolaan Apartemen Transit)	Web Based Web Based Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.20.02.03 Layanan Retribusi Rusunawa	SIAP JUARA	Web Based

BKT-DAB.04 Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	BKT-DAB.04.02 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Layanan Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH	SIMOJANG	Web Based
		Layanan pemberian bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga Fakir Miskin	DTKS	Web Based
	BKT-DAB.04.03 Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	Layanan pembinaan bagi seluruh anggota PSM	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Web Based
		Layanan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak	Aplikasi Sistem Informasi Pengangkatan Anak	Web Based
BKT-DAB.05 Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Ekanami	BKT-DAB.05.03 Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas	BKT-DAL.01.17.01.01 Layanan data jalan dan jembatan	Temen Jabar	Web Based

	Infrastruktur dan Transportasi			
		Pengawasan lalu lintas jalan	Aplikasi Terminal	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		Pengawasan lalu lintas jalan	SEMUT JABAR	Web Based
		Pengawasan lalu lintas jalan	SILAJA	Web Based
		Pengawasan lalu lintas jalan	SPION JABAR	Web Based
		Pengawasan lalu lintas jalan	Sistem Informasi Perlengkapan Jalan	Web Based
BKT-DAB.06 Pengelolaan Data dan Informasi		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based

		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based

		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi

		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pemuda Dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based

		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah	Web Based

			Kabupaten Mimika	
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan	Web Based

			Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Mimika	
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama		Domain Layanan	Aplikasi
				Basis Aplikasi

		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based

		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi RSUD Pemerintah Kabupaten Mimika	Web Based
		Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Aplikasi Barata	Web Based
		Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana		Web Based

			PUSDATIN	
		Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Peta Rawan Bencana	Web Based
		Layanan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kabupaten (Per Jenis Bencana)	e-Cegah SIAGA	Web Based
		Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	DMS (Disaster Management System)	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.20.03.01 Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman	Apartemen Transit	Web Based

		BKT-DAL.01.20.02.02 Layanan Pengadaan Lahan	SIMANTAN (Sistem Informasi Pertanahan)	Web Based
		BKT-DAL.01.20.02.02 Layanan Pengadaan Lahan	Open MAP	Web Based
		BKT-DAL.01.23.02.02 Parameter Kependudukan	SIDATUK	Web Based
		Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Aplikasi Stock Barang	Web Based
BKT-DAB.07 Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa		Layanan penyediaan makanan untuk korban bencana alam dan sosial Layanan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana alam dan sosial	ALBAS	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi

BKT-DAB.08 Pengelolaan Saran dan Prasarana		BKT-DAL.01.31.02.04 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang PAUD BKT-DAL.01.31.03.06 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SD BKT-DAL.01.31.05.05 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SMP	Aplikasi Pengajuan/Perbaikan Fasilitas Sekolah	Web Based
BKT-DAB.09 Pengelolaan Pelaporan		Layanan Pelaporan Penegakan Perda dan Perkada	SILANGGAR	Web Based
BKT-DAB.11 Perencanaan Pembangunan		BKT-DAL.01.17.01.03 Layanan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	SIPJAKI	Web Based
		BKT-DAL.01.17.01.04 Pelayanan Rekomendasi Utilitas	Aplikasi Konsultasi Publik	Web Based
		BKT-DAL.01.17.01.02 Informasi Kesesuaian	e-Musrenbang	Web Based

		Tata Ruang		
BKT-DAB.12 Pengelolaan Keuangan dan Aset		BKT-DAL.01.31.03.01 Layanan Informasi BOS SD BKT-DAL.01.31.03.11 Layanan Informasi BOS SMP	OMSPAN	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	KRISNA	Web Based
		Layanan penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	SIMPPSDB	Web Based
BKT-DAB.13 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur		Layanan Bantu Trantibum dan Kebencanaan	PUSDALOPS	Web Based

BKT-DAB.14 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan		Layanan Informasi Penegakan Perda dan Perkada	SICAPLANG	Web Based
		Layanan pendataan linmas inti	SILATIN	Web Based
BKT-DAB.15 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana		Layanan Pendataan Ormas Pemerintah Kabupaten Mimika, Aktivitas Ormas dan Penerbitan Surat Keterangan Ormas	Simbakesbangpol	Web Based
		Layanan Publikasi Data	Open Data Jabar	Web Based
		Layanan Pengaduan Ormas	SIKONDA	Web Based
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
BKT-DAB.16 Pengelolaan		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem	MONEV SCORECARD	Web Based

Akuntabilitas Kinerja		Informasi Tenaga Kependidikan		
		BKT-DAL.01.17.01.04 Pelayanan Rekomendasi Utilitas	Tali Kuat	Web Based

Bab 7 Arsitektur Keamanan

7.1. Struktur dan Referensi Arsitektur Keamanan

7.1.1. Prinsip Arsitektur Keamanan

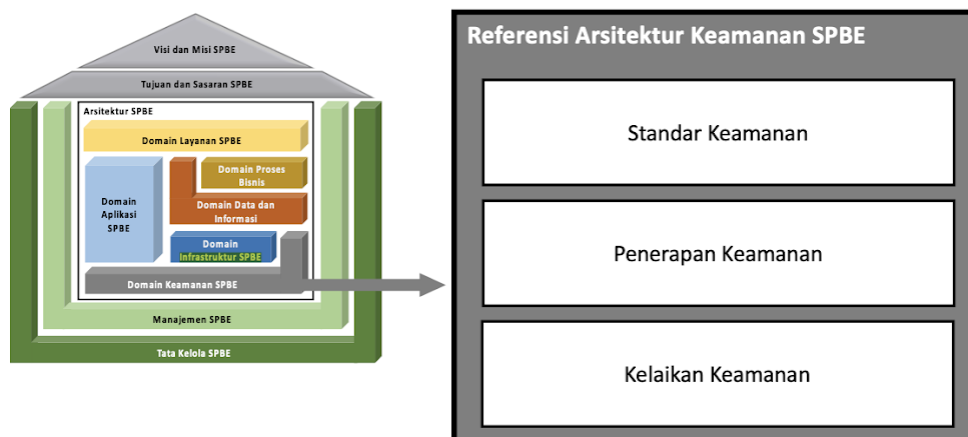
Prinsip-prinsip pengembangan arsitektur keamanan:

Kondisi yang akan dituju merupakan kondisi yang ingin dicapai untuk menjamin Keamanan SPBE yang terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keaslian, dan Kenirsangkalan (*nonrepudiation*).

7.1.2. Refrensi Keamanan Tingkat Nasional

Arsitektur Keamanan SPBE yang diterapkan pada Kabupaten Mimika harus sesuai dengan ketentuan Perpres 123 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Dengan mengacu pada peraturan, standar, dan kerangka kerja tertentu. Analisis arsitektur ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pada sisi teknis dan non teknis. Analisis ini dilakukan untuk kondisi ideal yang ingin dituju atau dicapai oleh Kabupaten Mimika.

Arsitektur keamanan Kabupaten Mimika menggambarkan layanan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kabupaten Mimika dengan acuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020. Arsitektur keamanan juga disusun dengan mengacu pada rancangan Peraturan Presiden tahun 2022 tentang Arsitektur keamanan SPBE Nasional seperti ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 7.1.1 Referensi arsitektur keamanan SPBE nasional

Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan keamanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Referensi Keamanan Tingkat Nasional

Domain data dan informasi juga mengacu pada referensi data dan informasi (RB) tingkat nasional, khususnya pada kode RAK

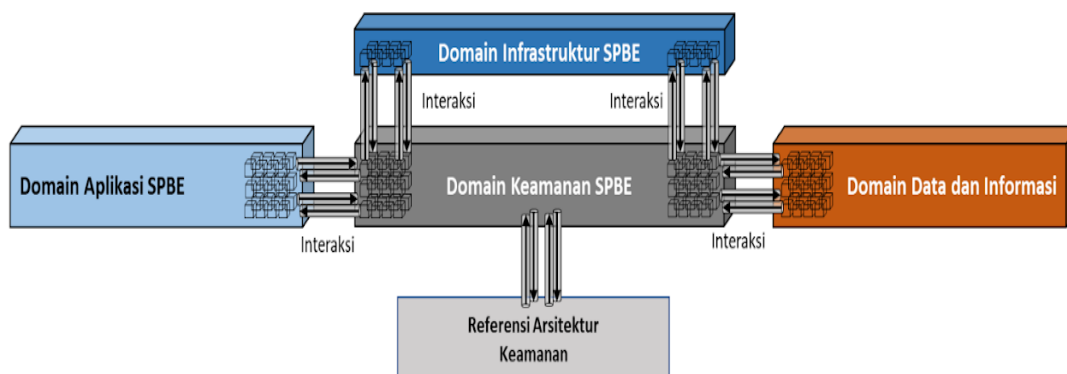


Gambar 7.1.2 Struktur Referensi arsitektur keamanan SPBE

7.1.3. Keterkaitan Antar Domain

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:

- domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.



Gambar 7.1.1 Keterkaitan Domain arsitektur keamanan SPBE

7.2. Keamanan Kabupaten Mimika

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam arsitektur keamanan sesuai standar SPBE nasional:

Kondisi yang akan dituju merupakan kondisi yang ingin dicapai untuk menjamin Keamanan SPBE yang terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keaslian, dan Kenirsangkalan (nonrepudiation).

Dalam mengamankan data dan informasi, terdapat beberapa poin yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Mimika dan dapat dilihat pada point-point pengamanan berdasarkan referensi berikut:

..... REFERENSI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 40 s.d. 41)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- ISO 27001

..... REFERENSI AUDIT TIK

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 55 s.d. 58)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Permenkominfo No. 16 Tahun 2023 - Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar/ketentuan teknis Audit Aplikasi dan Infrastruktur BRIN
- Standar/ketentuan teknis Audit Keamanan BSSN

7.2.1. Identifikasi Kebutuhan Keamanan

7.2.2. Metadata Arsitektur Keamanan

Sesuai dengan yang tercantum pada rencana Peraturan Presiden tentang SPBE, maka keamanan yang ada di lingkungan Kabupaten Mimika harus memiliki Metadata Keamanan dengan atribut yang telah ditentukan. Metadata untuk keamanan dapat dilihat pada tabel 7-1 berikut:

Keamanan Data dan Informasi

Kerahasiaan

Keaslian

Keutuhan

Kenirsangkalan

Ketersediaan

Keamanan Aplikasi SPBE

Aplikasi Berbasis Web

Autentikasi

Pencatatan Log

Persyaratan Kontrol

Validasi Input

Kriptografi

Penanganan Error

Manajemen Sesi

Proteksi Data

Keamanan Komunikasi

Logika Bisnis

Pengendalian Kode Berbahaya

File

Keamanan API dan Web Service

Keamanan Konfigurasi

Aplikasi Berbasis Mobile

Penyimpanan data dan persyaratan privasi

Autentikasi dan Manajemen Sesi

Komunikasi Jaringan

Kriptografi

Interaksi Platform

Kualitas Kode dan Pengaturan Build

Ketahanan

Keamanan Sistem Penghubung Layanan

Keamanan interoperabilitas data dan informasi

Kontrol sistem integrasi

Kontrol perangkat integrator

Keamanan API dan web service

Keamanan migrasi data

Service Level Agreement/SLA

Keamanan Jaringan Intra

Jaringan Intra pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD)

Aspek administrasi keamanan Jaringan Intra

Kontrol akses dan autentikasi

Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra

Kontrol keamanan gateway

Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel

Kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel

Keamanan Pusat Data Nasional (PDN)

Persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional

Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan Pusat Data (SNI 8799-2019)

Persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional

Memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur PDN

Memutus akses fisik atau logic dari perangkat yang tidak terotorisasi

Memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara remote

Memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area PDN

Melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala

Memastikan perangkat komputer PDN terbebas dari virus dan malware

Melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area PDN

Memastikan pengaktifan konfigurasi port universal serial bus telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang

Memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur PDN menggunakan internet protocol address dan hostname yang telah ditentukan

Menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan

Keterangan:

Gambar 6.5. Pemetaan Area Keamanan berdasarkan Teknis dan Prosedur

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 7 - 1 Metadata Arsitektur Keamanan Kabupaten Mimika

No	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	Nama Keamanan	Nama Infrastruktur, Aplikasi, Data/Informasi Terkait	Penanggung jawab → Unit Kerja (Dependency)	→ Layanan Terkait (Dependency)	→ RAA / RAD / RAI (Dependency)
1	01 - Standar Keamanan						
		01.01 - Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Perban BSSN 4	Keamanan Data Pembangunan & Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Keamanan Pembangunan & Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	RAI 03.01.01
				Data Pengelolaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi & Komunikasi	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pengelolaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi & Komunikasi	RAI 03.01.01
				Data Pengelolaan Keamanan Jaringan Internet	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pengelolaan Keamanan Jaringan Internet	RAI 03.01.01
				Data Pengelolaan Aset TIK	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pengelolaan Aset TIK	RAI 03.01.01
				infrastruktur Pengelolaan Data & Informasi	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pengelolaan Data & Informasi	RAI 03.01.01
				Infrastruktur Pemutakhiran Data	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pemutakhiran Data	RAI 03.01.01

No	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	Nama Keamanan	Nama Infrastruktur, Aplikasi, Data/Informasi Terkait	Penanggung jawab → Unit Kerja (Dependency)	→ Layanan Terkait (Dependency)	→ RAA / RAD / RAI (Dependency)
				Penyampaian Data	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Penyampaian Data	RAI 03.01.01
		01.02 - Standar Keamanan Internasional	ISO 27001	Keamanan Data Pembangunan & Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Keamanan Pembangunan & Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	RAI 03.01.01
				Keamanan Data Pengelolaan Manajemen Keamanan Layanan Teknologi Informasi & Komunikasi	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pengelolaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi & Komunikasi	RAI 03.01.01
				Keamanan Data Pengelolaan Keamanan Jaringan Internet	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pengelolaan Keamanan Jaringan Internet	RAI 03.01.01
				Keamanan Data Pengelolaan Aset TIK	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pengelolaan Aset TIK	RAI 03.01.01
				Keamanan infrastruktur Pengelolaan Data & Informasi	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pengelolaan Data & Informasi	RAI 03.01.01
				Keamanan Infrastruktur Pemutakhiran Data	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Pemutakhiran Data	RAI 03.01.01
				Keamanan Penyampaian Data	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan Penyampaian Data	RAI 03.01.01
		01.03 - Regulasi					

No	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	Nama Keamanan	Nama Infrastruktur, Aplikasi, Data/Informasi Terkait	Penanggung jawab → Unit Kerja (Dependency)	→ Layanan Terkait (Dependency)	→ RAA / RAD / RAI (Dependency)
		Lainnya					
			OWASP	Keamanan Infrastruktur Open Web And Security Protocol (OWASP)	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan keamanan open web di Kabupaten Mimika	RAI 03.01.01
			The Center for Internet Security (CIS)	NIST Special Publication 800-53 (PE-2: Physical and Environmental Protection)	Sekretariat (Bagian IT)	Layanan keamanan open web di Kabupaten Mimika	RAI 03.01.01

Bab 8 Penutup

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disusun guna memberikan gambaran sementara kondisi implementasi TIK untuk layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Mimika. Kondisi yang disampaikan dalam arsitektur ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa data dari kondisi yang ada di lingkungan Kabupaten Mimika. Dan pada dasarnya penyusunan naskah Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai bagi Kabupaten Mimika selama 5 (lima) tahun mendatang dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu jika dibutuhkan yang dituangkan kedalam dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Mimika.